

PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI LOKAL
(Studi Kasus Strategi KPU Kota Malang pada PEMILUKADA 2013)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Peminatan *Governance* dan
Transisi

Oleh :

Arya Wira Yudha

NIM. 0811250017



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2013

LEMBAR PENGESAHAN

**PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI LOKAL
(Studi Kasus Strategi KPU Kota Malang pada PEMILUKADA 2013)**

SKRIPSI

Disusun oleh :

Arya Wira Yudha

NIM.0811250017

Malang, 24 Desember 2013

Telah disetujui Dosen Pembimbing :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Wawan Edi Kuswandoro, S.Sos, M.SI

Mar'atul Makhmudah S.IP, M.SI

NIP. 69060811110411

NIP. 80080311120410

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI

PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI LOKAL

(Studi Kasus Strategi KPU Kota Malang pada PEMILUKADA 2013)

SKRIPSI

Disusun oleh :
Arya Wira Yudha
NIM.0811250017

Telah diuji dan dinyatakan **Lulus** dalam ujian Sarjana pada tanggal 24 Desember 2013 :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Wawan E. Kuswandoro, S.Sos M.SI
NIP. 69060811110411

Mar'atul Makhmudah S.IP, M.SI
NIP. 80080311120410

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Juwita Hayyuning Prastiwi, S.IP., M.IP
NIP. 89083011120398

H. B. Habibi Subandi, S. Sos, MA
NIP. -

Malang, 24 Desember 2013

Dekan FISIP UB

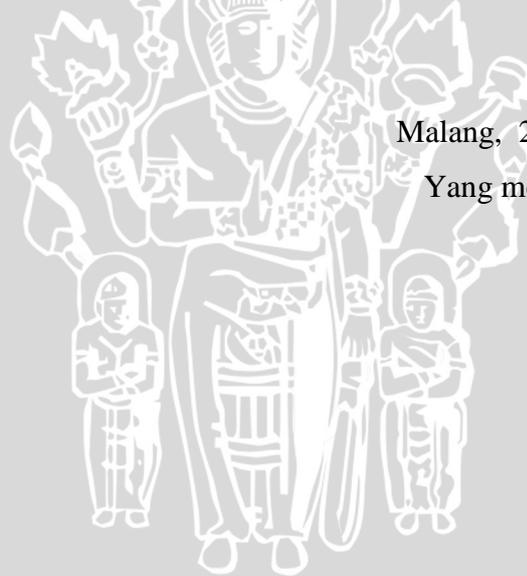
Prof. Dr. Ir.H Darsono Wisadirana MS

NIP. 19561227 198312 1 001

PERNYATAAN**Nama : AryaWira Yudha****NIM : 08111250017**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul **PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI LOKAL (Studi Kasus Strategi KPU Kota Malang pada PEMILUKADA 2013)** adalah betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.



Malang, 24 Desember 2013

Yang membuat pernyataan

Arya Wira Yudha

NIM. 0811250017

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI LOKAL** (Studi Kasus Strategi KPU Kota Malang pada PEMILUKADA 2013)

Penelitian skripsi ini mendasarkan pada studi kasus upaya peningkatan pendidikan politik masyarakat oleh KPU Kota Malang .Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang disusun dalam upaya untuk menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang.

Penulis sangat berterimakasih kepada Bpk. Wawan Edi Kuswandoro S.Sos, M.Si selaku pembimbing utama, Ibu Mar'atul Makhmudah S.IP.,M.Si selaku pembimbing pendamping , atas segala perhatian dan bimbingannya serta arahan-arahan yang diberikan kepada penulis dalam upaya menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih penulis disampaikan pula kepada Bpk. Hendry ST .MT. (Ketua KPU Kota Malang) ,Bpk. Zainudin, ST (Divisi Sosialisasi & Partisipasi Masyarakat),serta Bpk. Alim Mustofa S.Sos (Divisi Perencanaan & Data) atas bantuannya dalam penelitian lapangan.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bpk. Prof. Dr. Ir. Wisadirana, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, atas kesediaannya penulis belajar di fakultas tercinta.

Harapan penulis semoga laporan hasil penelitian skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial, khususnya Ilmu Politik yang berorientasi pada peningkatan pendidikan politik masyarakat.

Malang, 24 Desember 2013

Penulis
Arya Wira Yudha

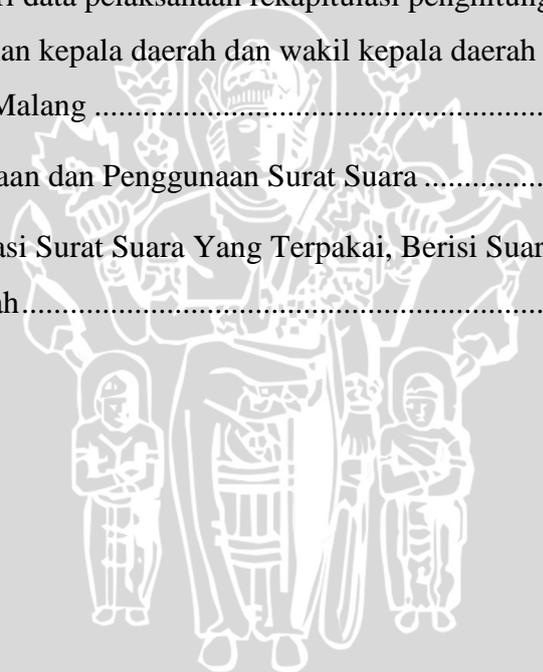
DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ..	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Teoritik.....	11
2.1.1 Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal.....	11
2.1.2 Pendidikan Politik	15
2.1.3 Pemilihan Umum	19
2.2 Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III. METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	29
3.2 Lokasi, Objek Penelitian, dan Pelaksanaan Penelitian	32
3.3 Fokus Penelitian	33
3.4 Pemilihan Informan	33

3.5 Sumber dan Jenis Data	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data	35
3.7 Teknik Analisis Data	37
BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	41
4.1 Kota Malang	41
4.2 KPU Kota Malang	45
4.2.1 Visi	45
4.2.2 Misi	45
4.2.3 Kode Etik	46
4.2.4 Tugas dan Wewenang	47
BAB V. STRATEGI PENDIDIKAN POLITIK	56
5.1 Proses Pemilukada Kota Malang	56
5.2 Perbandingan Rumusan Pengertian Pendidikan Politik	61
5.3 Pandangan KPU terhadap Masyarakat	65
5.4 Strategi KPU Kota Malang dalam Memberikan Pendidikan Politik Masyarakat	73
5.5 Hasil Pelaksanaan Strategi KPU Kota Malang dalam Memberikan Pendidikan Politik Masyarakat	78
BAB VI. PENUTUP	81
6.1 Kesimpulan	81
6.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84

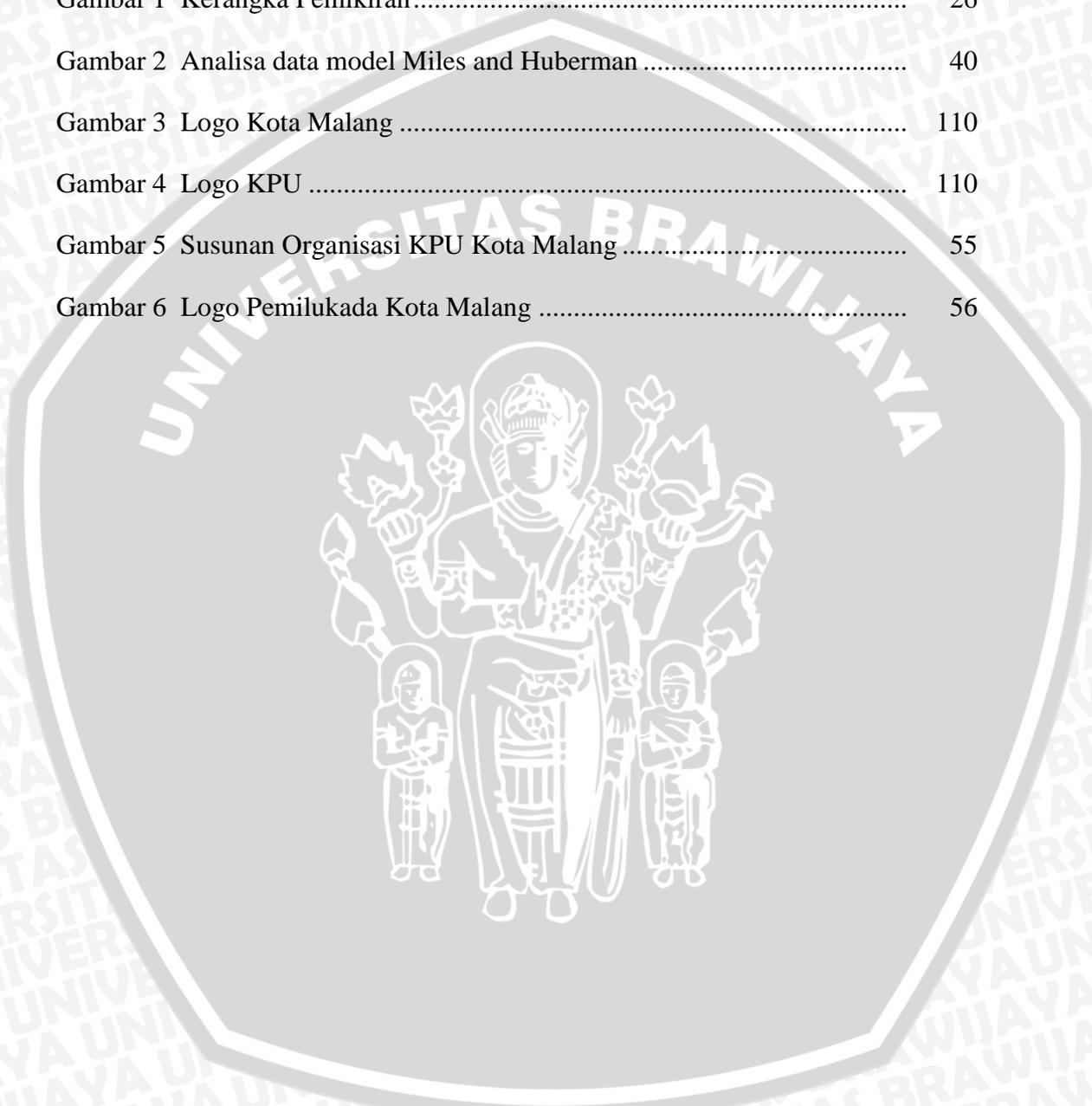
DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas wilayah kota malang	44
Tabel 2 Daftar Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang tahun 2013.....	59
Tabel 3 Tahapan Pemilukada Kota Malang tahun 2013	105
Tabel 4 Prosentase perolehan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 5 kecamatan kota Malang	61
Tabel 5 Prosentase dari data pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kota Malang	79
Tabel 6 Data Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara	108
Tabel 7 Data Klasifikasi Surat Suara Yang Terpakai, Berisi Suara Sah Dan Tidak Sah.....	109



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	26
Gambar 2 Analisa data model Miles and Huberman.....	40
Gambar 3 Logo Kota Malang.....	110
Gambar 4 Logo KPU.....	110
Gambar 5 Susunan Organisasi KPU Kota Malang.....	55
Gambar 6 Logo Pemilukada Kota Malang.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Hasil Wawancara terstruktur	86
Lampiran 2	Foto-foto Saat Wawancara Dengan Narasumber	104
Lampiran 3	Tahapan Pemilukada Kota Malang tahun 2013.....	105
Lampiran 4	Data Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara	108
Lampiran 5	Data Klasifikasi Surat Suara Yang Terpakai, Berisi Suara Sah Dan Tidak Sah.....	109
Lampiran 6	Logo Kota Malang dan Logo KPU	110
Lampiran 7	Curriculum Vitae	111
Lampiran 8	Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Malang.....	112
Lampiran 9	Data Penerimaan Penggunaan Surat Suara dan Klasifikasi Surat Suara yang Terpakai Berisi Suara Sah dan Tidak Sah Serta Jumlah TPS/ PPS/ PPK	113
Lampiran 10	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota.....	114

**POLITICAL EDUCATION AND LOCAL DEMOCRACY
(STUDY OF GENERAL ELECTORAL COMMISSION'S STRATEGIES
ON LOCAL ELECTIONS OF MALANG CITY 2013)**

ABSTRACT

The development of local democracy and the political climate in each region are always dynamic. Malang as the second largest city in East Java is a strategic and dynamic political region for contested its power by the political power. One of the implementation of local democracy is an election. General Electoral Commission of Malang, it called KPU is an institution that has full authority in the administration of the election. Democracy opened up the same opportunities for good and bad things so how important political education needed by the society. Political education in any society has institutions and devices that sustain them. That is KPU was the most decisive the occurred of quality election, not only administratively, even very strategic to success the occurred of the democratic celebration because from the beginning KPU has done the process of phasing in the election, from the party registration and election candidates. Then it followed by administration verifying of parties that qualified or not and then continues with verification in reality. That is the role of KPU is very important in packing the pattern of political strategies to improve the political education of society. If it drawn in the context of local area of Malang, KPU of Malang city is the most entitled to determine the occurred of quality election. Of course it will be interesting to reviewing further the strategy undertaken by KPU Malang in improving political education of society.

The method that used in this study is a qualitative, case study method. The researchers involved in the process of extracting information by using the techniques of data collection profound interviews, documentation and observation. Using the case study, this type of research can be explained by descriptive, that can be describe to be words, pictures, quotations interviews , and also the official documents that support this research.

From these results it can be concluded that the strategies of KPU to improve the political education of society are putting forward two-way form of communication, cooperating agencies, and being closer to the society. Related to the coverage area of definition of political education, there is a difference between the views of KPU with a real sense in which KPU only acts in political socialization and oriented the number of society who use their suffrage. So KPU has not been implementing political education in the real sense as a whole. Besides that, maturation strategy and political maturation of society that has been done by KPU has not been optimal. This is confirmed by the results of the election that indicates the number of abstentions were quite high which reached 35%.

Keywords: Local Democracy, Election, Political Education

PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI LOKAL (Studi Kasus Strategi KPU Kota Malang pada PEMILUKADA 2013)

ABSTRAKSI

Perkembangan demokrasi dan iklim politik lokal di masing-masing daerah selalu dinamis. Kota Malang sebagai Kota terbesar kedua di Jawa Timur merupakan wilayah politik strategis dan dinamis untuk diperebutkan kekuasaannya oleh kekuatan politik. Salah satu implementasi dari demokrasi lokal adalah dengan adanya pemilukada. KPU Kota Malang merupakan Institusi yang memiliki wewenang penuh dalam penyelenggaraan pemilukada tersebut. Demokrasi membuka peluang yang sama kepada hal baik dan hal buruk sehingga betapa pendidikan politik bagi masyarakat sangat penting dibutuhkan. Pendidikan politik dalam masyarakat manapun memiliki institusi dan perangkat yang menopangnya. Yakni KPU lah yang paling menentukan berlangsungnya pemilu yang berkualitas, tidak hanya secara administratif, bahkan sangat strategis dalam mensukseskan jalannya pesta demokrasi. Karena memang KPU lah yang sejak awal sudah melakukan proses penahapan pemilu dari pendaftaran partai dan calon peserta pemilu. Disusul dengan verifikasi administrasi atas partai-partai yang lolos atau tidak lolos dan berlanjut dengan verifikasi dilapangan. Disitulah KPU Berperan sangat penting dalam mengemas pola strategi peningkatan pendidikan politik masyarakat. Jika ditarik dalam konteks lokal daerah Kota Malang, yakni KPU Kota Malang lah yang paling menentukan berlangsungnya pemilukada yang berkualitas. Tentunya hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Malang dalam meningkatkan pendidikan politik masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif studi kasus. Peneliti ikut terlibat dalam proses penggalian informasi dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Dengan menggunakan studi kasus, jenis penelitian pun dapat dijelaskan secara deskriptif, dapat berupa kata-kata, gambar, kutipan-kutipan hasil wawancara, dan juga dokumen resmi yang mendukung penelitian ini.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi KPU dalam meningkatkan pendidikan politik masyarakat yakni dengan mengedepankan bentuk komunikasi dua arah, menggandeng agen-agen, dan lebih dekat dengan masyarakat. Terdapat perbedaan pandangan terkait wilayah cakupan pengertian pendidikan politik antara pandangan KPU dengan pengertian yang sebenarnya dimana KPU hanya bertindak sebatas sosialisasi politik dan hanya berorientasi pada banyaknya jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Jadi KPU belum melaksanakan pendidikan politik dalam arti yang sebenarnya secara utuh. Selain itu strategi pendewasaan dan pematangan politik masyarakat yang telah dilakukan oleh KPU belum optimal. Hal ini dipertegas dengan hasil lapangan yang menunjukkan angka golput yang cukup tinggi, yakni mencapai angka 35 %.

Kata Kunci : Demokrasi Lokal, Pemilukada, Pendidikan Politik

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Munculnya kebijakan desentralisasi otonomi daerah yang diatur dalam UU nomor 22 dan 25 tahun 1999 mempercepat proses demokratisasi dan memperbaiki kualitas demokrasi di daerah. Transisi demokrasi di daerah berarti masa peralihan dari kondisi pemerintahan daerah yang kurang demokratis menuju pada pemerintahan yang lebih demokratis. Demokrasi pemerintahan di daerah merupakan ajang pendidikan politik bagi warga negara, pengontrol perilaku pemerintah pusat yang anti demokratis, penyokong kualitas partisipasi yang lebih baik, serta penguat kepercayaan antara daerah dengan pusat. Adanya UU nomor 22 dan 25 tahun 1999 ini, daerah tidak hanya memiliki kewenangan yang lebih bersifat administratif, tetapi juga memiliki kewenangan di bidang politik. Dengan demikian daerah memiliki kekuasaan dan otoritas untuk merumuskan kebijakan-kebijakan untuk diri mereka sendiri.

Laju demokratisasi di Indonesia pasca Orde Baru telah menghasilkan sistem politik yang sangat berbeda dengan sistem politik yang dianut selama masa Orde Baru. Corak masyarakat Indonesia yang plural menambah tantangan bagi jalannya proses demokrasi. Demokrasi di Indonesia juga memunculkan banyak partai politik baru dengan berbagai ideologi politik yang berbeda-beda. Corak ideologi yang ditawarkan oleh berbagai partai politik di Indonesia yang berbeda-

beda memberikan warna tersendiri bagi jalannya demokrasi di Indonesia. Dengan berbagai ideologi partai politik, para pengurus partai berupaya menarik simpati rakyat semaksimal mungkin dengan mengakomodasi, menampung dan mengagregasikan aspirasi anggota, simpatisan, dan rakyat pada umumnya menjadi alternatif kebijakan publik untuk diperjuangkan kedalam lembaga legislatif dan eksekutif.

Dalam suatu sistem politik demokrasi, kehadiran pemilihan umum (pemilu) adalah suatu keniscayaan. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilu dianggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Pemilu sangat penting bagi kehidupan demokrasi suatu negara. Dimana Pemilu merupakan salah satu sarana bagi rakyat untuk menyalurkan suara dan aspirasinya kepada negara. Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat juga merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis.

Begitu pula yang terjadi di daerah yang sistem politiknya juga banyak berubah. Namun laju demokratisasi di daerah tidak jarang menimbulkan berbagai masalah yang perlu dijadikan bahan pembelajaran dan perlu dicarikan jalan keluar. Dalam pemilihan umum di daerah, praktek politik uang, pengelembungan suara, kampanye terselubung, pemalsuan data, rendahnya partisipasi politik masyarakat dan sebagainya sering menjadi penyebab kekisruhan dalam pemilihan umum di daerah. Kejadian ini menunjukkan demokrasi yang berjalan di Indonesia belum selancar yang dicita-citakan. Pemilihan umum di daerah yang seharusnya jujur, sportif, dan *fair* justru tidak jarang diwarnai dengan tindakan yang melanggar aturan. Hal ini merupakan pertanda bahwa Indonesia perlu berbenah.

Dengan melihat transisi demokrasi Indonesia yang kompleks itu, maka dibutuhkan adanya suatu pendidikan politik bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan salah satu fungsi pemilu yaitu sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat. Dengan demikian masalah-masalah mengenai perpolitikan yang berhubungan dengan kepemiluan sangat kompleks sehingga masyarakat dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih tentang masalah politik.

Pendidikan politik diharapkan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakatnya, mampu membentuk kepribadian politik, dan mampu menciptakan kesadaran politik. Pendidikan politik merupakan aktifitas yang terus berlanjut sepanjang hidup manusia dan itu tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang bebas.

Pendidikan politik memiliki fungsi-fungsi pemikiran moral dan akan menyiapkan anak bangsa untuk mengeluti persoalan sosial dalam medan kehidupan dalam bentuk atensi dan partisipasi serta menyiapkan mereka untuk mengemban tanggung jawab memberikan kesempatan yang mungkin mereka bisa menunaikan hak dan kewajibannya. Hal itu menuntut pendidikan anak bangsa untuk mengeluti berbagai persoalan sosial dalam medan kehidupan mereka dalam bentuk atensi dan partisipasinya secara politik, sehingga mereka paham terhadap ideologi politik yang dianutnya untuk kemudian membelanya dan dengannya mereka wujudkan cita-cita diri dan bangsanya. Pendidikan politik inilah yang mentransfer nilai-nilai dan ideologi politik dari generasi ke generasi, dimulai dari usia dini dan terus berlanjut sepanjang hayat.

Pendidikan politik merupakan kebutuhan darurat bagi masyarakat, karena berbagai faktor yang saling mempengaruhi, dengan demikian pendidikan politiklah yang dapat membentuk perasaan sebagai warga negara yang benar, membangun individu dengan sifat-sifat yang seharusnya, lalu mengkristalkannya sehingga menjadi nasionalisme yang sebenarnya. Ialah yang akan menumbuhkan perasaan untuk senantiasa barafiliasi, bertanggung jawab dan berbangga akan jati diri bangsa. Tuntunan ini demikian mendesak dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, mengingat bahwa penumbuhan perasaan seperti itu menjadikan seorang warga negara serius mengetahui hak dan kewajibannya, serta berusaha memahami berbagai problematika masyarakat.

Pendidikan politik diharapkan memberdayakan masyarakat di bidang politik. Maksud dari pemberdayaan di bidang politik adalah membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melakukan peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki. Dengan pendidikan politik yang optimal maka akan menciptakan warga negara yang mengetahui hak dan kewajibannya dan menyadari bahwa hak dipilih dan memilih merupakan hak yang melekat pada dirinya. Dan juga menciptakan para pemilih yang rasional yang sesuai dengan pemikirannya serta menjauhkan pemilu dari politik uang karena para pemilih telah pandai dan menyadari bahwa uang tidak dapat membeli hak suaranya. Pemilih tidak lagi memilih secara emosional ataupun subjektif, tetapi lebih kepada

program-program yang akan dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga dengan ini diharapkan suara-suara dalam pemilu lebih berkualitas tidak suara yang apatis ataupun suara yang asal memilih. Dari periode ke periode, sistem pemilihan umum di Indonesia terus mengalami perubahan sesuai dengan berubahnya corak pemerintahan Indonesia, dari orde baru kedalam era reformasi. Perubahan tersebut juga diikuti dengan perubahan undang-undang pemilu yang menunjukkan betapa pentingnya pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik perlu diberikan kepada masyarakat awam politik. Dengan pendidikan politik, masyarakat diharapkan dapat memahami hak dan kewajiban serta dapat menempatkan diri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah posisi dari pendidikan politik dalam kerangka penelitian ini.

Pendidikan politik dalam masyarakat manapun mempunyai institusi dan perangkat yang menopangnya. Di Indonesia, institusi yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Institusi yang paling menentukan berlangsungnya pemilihan umum (pemilu) yang berkualitas, jujur, dan adil, pastilah KPU. Hal ini bukan berarti menafikan peran penting dari partai-partai politik, badan pengawas pemilu, dan lembaga pengadilan dalam menjalankan peran serta fungsi masing-masing agar pemilu benar-benar berkualitas dan sesuai dengan asas-asas demokrasi. Alasan atau boleh dikatakan mengapa KPU yang paling menentukan adalah karena KPU lah yang sejak awal sudah melakukan proses penahapan pemilu dari pendaftaran partai dan calon peserta pemilu. Itu disusul dengan verifikasi administrasi atas partai-partai yang lolos atau tidak lolos verifikasi administrasi, berlanjut dengan verifikasi di

lapangan. KPU bertanggung jawab agar pelaksanaan pemilu berjalan langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil. Disitulah KPU berperan sangat penting dalam mengemas pola peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat mengingat masih sering adanya hal-hal negatif yang terjadi dalam pemilihan umum.

Pemilu tidak sekedar persoalan memilih dan dipilih, namun merupakan salah satu wahana pendidikan politik untuk warga negara. Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan. Pemilihan Umum, pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Tugas lembaga pemilu khususnya KPU, senantiasa berbasis dua hal. Pertama, melaksanakan pemilu yang jujur dan adil, serta sosialisasi dan konsultasi publik tentang sistem pemilu yang dilaksanakan. Kedua, memandu masyarakat tentang nilai-nilai berbangsa yang menjadi skala prioritas Pemilu berdasarkan pemetaan sosiopolitik pemilu, baik pemetaan pemilu sebelumnya maupun kebutuhan pendidikan warga negara di masa yang akan datang. Sehingga diharapkan tercipta pendidikan keterampilan politik masyarakat melalui skala prioritas tertentu misalnya sifat kritis, respek, berpikir kompetitif serta pemetaan program kerja berbangsa. Demikianlah mengapa peningkatan pendidikan politik urgen dilaksanakan oleh KPU kepada masyarakat yang notabene merupakan calon pemilih dalam pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU.

Lembaga KPU ini, memberikan andil yang cukup besar tidak hanya secara administratif, bahkan sangat strategis dalam mensukseskan jalannya pesta demokrasi di Indonesia. Pemilu dapat dikatakan berhasil apabila seluruh

masyarakat Indonesia yang telah mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia menggunakan hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya sekedar memeriahkan pesta demokrasi, tetapi jua untuk menunjukkan kontribusinya demi masa depan bangsa ini. Demi tercapainya pemilu yang demokratis, KPU dituntut untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat secara professional, proporsional dan bertanggung jawab. KPU harus memberikan kontribusi yang nyata dibidang pelayanan publik dalam bidang pemilu. Karena pemilu merupakan sarana pendidikan politik di tingkat nasional dan lokal melalui sepuluh prinsip penerapan, yaitu penyediaan pelayanan publik yang meliputi kesederhanaan, kepastian, waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, dan keramahan serta kenyamanan. Dengan begitu, KPU secara fungsional dapat dijadikan sebagai lembaga yang dapat mengupayakan peningkatan pendidikan politik masyarakat. KPU memiliki kuasa penuh dalam menjalankan pemilihan umum dan sangat memungkinkan mengemas kegiatannya dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik diharapkan tidak hanya dapat membantu seluruh rakyat mendapatkan informasi sejelas-jelasnya dan sebanyak-banyaknya tentang penyelenggaraan pemilu tetapi juga membantu masyarakat berdaya dibidang politik. Menyadari hak dan kewajibannya yang melekat pada dirinya serta agar masyarakat terhindar dan terlindungi dari praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

Salah satu tujuan pendidikan secara mendasar adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga, pendidikan politik tidak dapat dilepaskan dari misi

tersebut. Pendidikan politik urgen untuk dilakukan oleh KPU ditengah sistem pemilu yang terus dinamis sehingga akan memberikan pelajaran bagi masyarakat dan tentunya bagi proses demokrasi bangsa ini. Maka dari itu, dibutuhkan suatu strategi oleh KPU untuk kesuksesan dalam hal upaya peningkatan pendidikan politik masyarakat. Strategi merupakan hal yang sangat penting karena strategi merupakan cara dalam mencapai suatu tujuan sehingga misi dapat dicapai.

Pemilu tahun 2013 telah bergulir di daerah Kota Malang. KPU Kota Malang adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari KPU yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemilu tersebut. Pendidikan politik pada pemilu Kota Malang sangat urgen untuk diberikan oleh KPU Kota Malang karena sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya dengan total penduduk 820.243 jiwa (2010), dengan tingkat pertumbuhan 3,9% per tahun, Kota Malang merupakan wilayah politik yang sangat strategis dan dinamis untuk diperebutkan kekuasaannya oleh sebuah kekuatan politik. Hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi KPU Kota Malang untuk lebih dapat memformulasikan suatu strategi untuk memberikan suatu upaya peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat Kota Malang. Lebih lengkapnya akan dipaparkan oleh penulis pada bab berikutnya terkait pemilihan objek dan lokasi penelitian tersebut.

Terkait dengan hal-hal yang sudah dijelaskan diatas, dalam hal ini penulis bermaksud ingin melakukan penelitian dengan judul **Pendidikan Politik dan Demokrasi Lokal (Studi Kasus Strategi KPU Kota Malang pada Pemilu pada 2013)**

1.2 Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah tersebut adalah bagaimana strategi KPU Kota Malang dalam upaya peningkatan pendidikan politik masyarakat PEMILUKADA tahun 2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui strategi KPU Kota Malang dalam upaya peningkatan pendidikan politik masyarakat pada PEMILUKADA tahun 2013

1.4 Manfaat Penelitian

Bagi Mahasiswa

- a. Memberikan pengetahuan dan pengalaman baru tentang pendidikan politik masyarakat dalam pemilu
- b. Mengetahui praktik-praktik atau perilaku KPU Kota Malang dalam upaya peningkatan pendidikan politik masyarakat

Bagi Perguruan Tinggi

- a. Memberikan bahan masukan sebagai stimulus peningkatan sumber daya manusia, melalui peningkatan bahan perkuliahan sebagai inspirasi untuk rancangan pengabdian masyarakat dan penelitian.
- b. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga terkait sebagai usaha meningkatkan serapan pekerjaan bagi lulusan mahasiswa.

- c. Studi ini sangat penting sebagai bahan referensi dan argumentasi ilmiah dalam memandang demokrasi lokal dan peranan komisi pemilihan umum daerah

Bagi Masyarakat

- a. Memberikan pendidikan, wawasan dan informasi politik yang ilmiah dan dapat dipahami dalam mengetahui konstelasi politik lokal di Kota Malang
- b. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan politik.
- c. Studi ini sangat penting sebagai sumber informasi ilmiah untuk meningkatkan rasionalitas masyarakat dalam memahami konteks politik lokal di daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritik

2.1.1. Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal

Di setiap Negara yang penyelenggaraan pemerintahannya membagi-bagi dalam daerah otonom, memiliki sejarah kebangsaannya yang berbeda-beda. Bagi Negara Indonesia penyelenggaraan otonomi daerah tidak sekedar adanya penyerahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah agar pemerintahan berjalan efektif dan efisien saja. Menurut Bagir Manan (2009:13), terdapat alasan-alasan filosofis dari sekedar bertujuan efektif dan efisiensi pemerintahan, yaitu mengingat Indonesia sebagai:

- a. Negara hukum. Di dalam Negara hukum terdapat pemencaran kewenangan. Otonomi daerah mewadahi salah satu pemencaran kewenangan.
- b. Negara demokratis. Otonomi daerah bermaksud mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- c. Kebhinekaan. Otonomi daerah justru mewadahi perbedaan-perbedaan (pluralistik) yang ada dalam masyarakat.
- d. Negara kesejahteraan. Dengan otonomi daerah akan mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, aspirasi masyarakat menjadi fondasi hak daerah dalam mengatur, mengurus rumah tanganya sendiri.

Penyelenggaraan secara partisipatif merupakan salah satu ciri penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan kata lain, secara substansi yang otonom itu adalah masyarakat daerah. Sehingga masyarakat mengapresiasi hak-hak nya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terwujudnya aspirasi masyarakat tersebut dengan diselenggarakannya desentralisasi yaitu pemerintah memberikan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus.

Otonomi daerah memberikan ruang dan peran yang strategis dalam mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih memberdayakan semua potensi yang dimiliki untuk membangun dan mengembangkan daerahnya menuju demokrasi lokal yang mapan. Kongkritnya dengan lahirnya kebijakan otonomi daerah, sehingga jika kita korelasikan kebijakan otonomi daerah dengan konteks demokrasi lokal (*local democracy*) akan lebih menarik apabila, tatkala daerah memegang peran sentral dalam membangun daerahnya. Orientasi Kebijakan ini akan bermuara pada pro-aktif dari masyarakat dalam mengontrol pemerintahan daerah, sehingga peran masyarakat menjadi penting dalam mengambil sebuah kebijakan di daerah dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan atau aspirasi masyarakat setempat. Otonomi daerah pada hakekatnya berkeinginan

mendekatkan pengambil kebijakan dengan masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah daerah seharusnya menggambarkan potensi, kebutuhan, dan kondisi daerahnya. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa alasan filosofis politik desentralisasi adalah karena Negara Indonesia merupakan Negara demokrasi. Dan demokrasi ditunjukkan dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Penyelenggaraan otonomi daerah yang demokratis adalah adanya peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan di tingkat daerah. Pelaksanaan otonomi daerah memaksimalkan segala potensi yang ada di daerah dengan memberikan perhatian khusus terhadap hal-hal yang dianggap memiliki potensi serta yang menjadi kebutuhan daerah tersebut, sehingga tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara langsung dan nyata dalam penerapan otonomi daerah. Melalui otonomi daerah ini diharapkan pemerintah daerah akan lebih mandiri dalam menentukan kegiatannya. Selain itu pemerintah daerah juga diharapkan tidak terkooptasi oleh pemerintah pusat dalam mengatur dan mengurus daerah. Jadi pelaksanaan otonomi daerah ini pemerintah daerah dapat mengidentifikasi masalah secara mendalam mengenai potensi sumber pendapatan daerah, tuntutan masyarakat, serta menentukan skala prioritas atas beberapa kebutuhan masyarakat di daerah.

Otonomi daerah adalah hak daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensinya, bukan hanya pelimpahan wewenang, otonomi daerah dilaksanakan oleh masyarakat melalui mekanisme perwakilan yakni melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adanya pemerintah daerah yang dilengkapi dengan badan perwakilan daerah yang berhak mengatur dan

mengurus pemerintahannya sendiri dapat pula dikatakan sebagai upaya untuk mendekatkan pengambilan kebijakan atau keputusan dengan rakyat. Sehingga kebijakan atau keputusan yang diambil itu sesuai dan menggambarkan potensi, kebutuhan, dan kondisi masyarakat di daerahnya. Mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri di tingkat daerah tidak lain adalah pelembagaan kedaulatan rakyat di daerah melalui sistem perwakilan. Melalui mekanisme perwakilan rakyat daerah bebas untuk menyampaikan gagasan dan didengar pendapatnya dalam rangka pengambilan kebijakan di daerah, yang dalam prinsip-prinsip *good governance* adalah partisipasi masyarakat.

Begitu pula dengan penentuan kepala daerah, mengingat pemerintahan daerah terdiri atas DPRD dan pemerintah daerah yaitu kepala daerah dan perangkat daerah, sehingga dibutuhkan partisipasi masyarakat. Penentuan kepala daerah sangat penting karena akan menentukan corak pemerintahan di daerah tersebut. Otonomi daerah dan desentralisasi akan memperluas kesempatan pada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Semakin luas desentralisasi, semakin luas pula dasar pelaksanaan paham kerakyatan. Seperti yang sudah disampaikan diatas, pelembagaan kedaulatan rakyat disalurkan melalui sistem perwakilan, dan sistem perwakilan tersebut dilaksanakan dengan mekanisme pemilihan umum (pemilu) yang sudah diatur dalam undang-undang pemilu. Oleh karena itu, peranserta masyarakat, khususnya masyarakat daerah, sangat diharapkan, bukan hanya meramaikan pesta demokrasi di daerah, melainkan benar-benar turut aktif dengan kesadaran dan pemahaman yang mendalam terkait

pemilu dan dalam menentukan pilihan siapa yang layak menjadi kepala daerah dan wakil rakyat untuk DPRD.

2.1.2. Pendidikan Politik

Banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah sosialisasi politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Ramlan Surbakti (1999:117) berpendapat bahwa sosialisasi dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik. Pendidikan politik mengajarkan masyarakat untuk lebih mengenal sistem politik negaranya. Dapat dikatakan bahwa pendidikan politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses pendidikan politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik juga bisa dikatakan, suatu upaya sadar yang dilakukan antara pemerintah dan para anggota masyarakat secara terencana, sistematis, dan dialogis dalam rangka untuk mempelajari dan menurunkan berbagai konsep, symbol-simbol, hal-hal dan norma-norma politik dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Jika dikaitkan dengan KPUD sebagai penyelenggara pemilihan umum di daerah, pendidikan

politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan pemilihan umum tersebut kepada masyarakat agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga negara. Pendidikan politik adalah aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu.

Pendidikan politik meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, meliputi juga loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Disamping itu, ia bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakatnya. Pendidikan politik merupakan aktifitas yang terus berlanjut sepanjang hidup manusia dan itu tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang bebas. Tujuan diadakannya pendidikan politik secara formal terdapat dalam Inpres No.12 tahun 1982 yaitu tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian pendidikan politik memiliki tiga tujuan yaitu membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik. Berdasarkan Inpres no.12 tahun 1982, yang menjadi landasan hukum pendidikan politik adalah landasan pokok pendidikan politik yang disertai landasan kesejarahan. Landasan tersebut sebagai berikut:

- a) landasan ideologis yaitu pancasila
- b) landasan konstitusi yaitu UUD 1945

- c) landasan operasional, yaitu GBHN
- d) landasan historis, yaitu sumpah pemuda 28 Oktober 1928 dan proklamasi 17 Agustus 1945

Pendidikan politik juga memiliki dasar dasar ideologis, sosial dan politik. bertolak dari situlah tujuan-tujuannya dirumuskan. Jika yang dimaksud dengan “Pendidikan” adalah proses menumbuhkan sisi- sisi kepribadian manusia secara seimbang dan integral, maka “Pendidikan Politik” dapat dikategorikan sebagai dimensi pendidikan, dalam konteks bahwa manusia adalah makhluk politik. sebagaimana halnya bahwa pendidikan mempunyai fungsi-fungsi pemikiran moral, dan ekonomi, maka pendidikan politik juga mempunyai fungsi politik yang akan direalisasikan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan politik itulah yang akan menyiapkan anak bangsa untuk mengeluti persoalan sosial dalam medan kehidupan dalam bentuk atensi dan partisipasi, menyiapkan mereka untuk mengemban tanggung jawab dan memberi kesempatan yang mungkin mereka bisa menunaikan hak dan kewajibannya. Hal itu menuntut pendidikan anak bangsa untuk menggeluti berbagai persoalan sosial dalam medan kehidupan mereka dalam bentuk atensi dan partisipasinya secara politik, sehingga mereka paham terhadap ideologi politik yang dianutnya untuk kemudian membelanya dan memperjuangkannya.

Pendidikan politik inilah yang mentransfer nilai-nilai dan ideolog politik dari generasi ke generasi, dimulai dari usia dini dan terus berlanjut sepanjang hayat. Pendidikan politik merupakan kebutuhan darurat bagi masyarakat, karena

berbagai faktor yang saling mempengaruhi, dengan demikian pendidikan politiklah yang dapat membentuk perasaan sebagai warga negara yang benar, membangun individu dengan sifat-sifat yang seharusnya, lalu mengkristalkannya sehingga menjadi nasionalisme yang sebenarnya. Ialah yang akan menumbuhkan perasaan untuk senantiasa berafiliasi, bertanggung jawab dan berbangga akan jati diri bangsa. Tuntunan ini demikian mendesak dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, mengingat bahwa penumbuhan perasaan seperti itu menjadikan seorang warga negara serius mengetahui hak dan kewajibannya, serta berusaha memahami berbagai problematika yang ada di masyarakat saat ini. Pendidikan politik juga merupakan konsep bagian dari proses perubahan kehidupan politik yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif, dan efisien. Pendidikan politik ini berfungsi untuk memberikan isi dan arah serta pengertian kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung.

Pendidikan politik dapat diberikan melalui berbagai jalur. Pemberian pendidikan politik tidak hanya dibatasi oleh lembaga seperti persekolahan atau organisasi saja, namun dapat diberikan melalui media, misalnya media cetak dalam bentuk artikel. Apapun bentuk pendidikan politik yang akan digunakan dan semua bentuk yang disuguhkan diatas sesungguhnya tidak menjadi persoalan. Aspek yang terpenting adalah bahwa bentuk pendidikan politik tersebut mampu untuk memobilisasi symbol-simbol nasional sehingga pendidikan politik mampu menuju pada arah yang tepat yaitu meningkatkan daya pikir dan daya tanggap rakyat terhadap masalah politik. Selain itu, bentuk pendidikan politik yang dipilih

harus mampu meningkatkan rasa keterikatan diri (*sense of belonging*) yang tinggi terhadap tanah air, bangsa, dan negara. Hal-hal yang mengenai kurikulum pendidikan politik diatur dalam instruksi Presiden No.12 tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi generasi muda yang menyebutkan bahwa bahan pendidikan politik antara lain:

1. Penanaman kesadaran berideologi, berbangsa, dan bernegara
2. Kehidupan dan kerukunan hidup bersama
3. Motivasi berprestasi
4. Pengalaman kesamaan hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia
5. Pengembangan kemampuan politik dan kemampuan pribadi untuk mewujudkan kebutuhan dan keinginan ikut serta dalam politik
6. Disiplin pribadi, sosial, dan nasional
7. Kepercayaan pada pemerintah
8. Kepercayaan pada pembangunan yang berkesinambungan

2.1.3. Pemilihan Umum

Dalam penyelenggaraan ketatanegaraan, pemilihan umum (pemilu) merupakan instrument penting untuk mengejawantahkan kedaulatan rakyat dan juga merupakan metode yang secara universal digunakan untuk mengisi keanggotaan perwakilan dan kepala daerah dalam konteks otonomi daerah. Mengingat, di dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan sulit untuk mencari contoh suatu negara yang mempraktekkan rakyat dapat menyatakan kehendaknya sendiri-sendiri atau secara perseorangan untuk menentukan kebijakan yang akan

dilakukan pemerintahnya. Apalagi jika mengetahui negara Indonesia yang memiliki jumlah penduduk lebih dari dua ratus juta jiwa dengan wilayah teritorial yang sangat luas, keanekaragaman suku, agama, etnis, tentu tidaklah mungkin rakyat tersebut dapat melaksanakan kehendaknya secara langsung. Sehingga diperlukan suatu mekanisme atau metode sebagai wahana rakyat melaksanakan kehendaknya. Kedaulatan rakyat tidak mungkin dilaksanakan secara murni. Oleh karena itu kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui sistem perwakilan.

Secara universal pemilu adalah instrument mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang legitimate serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Pemilu dalam perkembangan negara modern menjadi tonggak demokrasi. Substansi demokrasi secara universal adalah pemerintahan yang dipilih langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakil rakyat yang representatif. Dengan kata lain, yang sebenarnya menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah para wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan, yang biasa disebut parlemen.

Kedaulatan rakyat atas penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh presiden dan kepala daerah yang juga telah dipilih secara langsung. Oleh karena telah dipilih secara langsung, maka dalam sistem ketatanegaraan Indonesia baik anggota legislatif maupun presiden dan kepala daerah semuanya pada dasarnya adalah wakil-wakil rakyat, yang menjalankan fungsi masing-masing. Hal diatas menunjukkan betapa pentingnya kedudukan dan fungsi wakil rakyat dalam siklus

ketatanegaraan. Dengan demikian diharapkan wakil-wakil rakyat tersebut, sungguh-sungguh bertindak atas nama rakyat, oleh karena itu wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri sendiri oleh rakyat melalui pemilu.

Syamsuddin Haris (2009:7) membagi beberapa fungsi pemilu yang tidak bias dipisah-pisahkan, antara lain:

a. Legitimasi Politik

Fungsi legitimasi politik bermakna bahwa melalui pemilu keabsahan pemerintah yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkan.

b. Fungsi Perwakilan Politik

Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat baik dalam rangka mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintah dan program serta kebijakan yang dihasilkan. Dalam kaitan ini pemilu merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk di lembaga pemerintahan maupun lembaga legislatif.

c. Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa

Keterkaitan pemilu dengan sistem elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas. Secara teoritis hubungan pemilu dengan sirkulasi elit dengan melihat proses mobilitas kaum elit atau non-elit yang menggunakan jalur institusi politik, pemerintahan, dan lembaga masyarakat untuk menjadi elit tingkat

nasional, yakni sebagai anggota cabinet atau jabatan setara. Jadi pemilu merupakan sarana dan jalur langsung untuk mencapai elit penguasa.

d. Sarana Pendidikan Politik

Pemilu merupakan pendidikan politik kepada masyarakat secara langsung, terbuka, dan massal yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Dalam kaitan ini maka struktur, proses, maupun fungsi pemilu diharapkan bisa mencerdaskan dan mencerahkan wawasan masyarakat, sehingga secara berangsur kehidupan politik dapat dipulihkan kearah yang lebih demokratis.

Sebagaimana keempat fungsi pemilu di atas, menunjukkan bahwa pemilu merupakan mekanisme yang menjamin prinsip kedaulatan rakyat dalam sebuah negara demokrasi. Karena itu pemilu menjadi kecenderungan sebagai agenda penting, tidak saja dari dimensi warga negara tetapi juga pemerintah yang memegang kekuasaan.

Secara substansi fungsi pemilu adalah penjamin perwujudan kedaulatan rakyat yang dilakukan melalui mekanisme yang absah. Implementasi kedaulatan rakyat untuk memberi kesempatan kepada kepada warga negara menjalankan fungsi kontrol terhadap perilaku penguasa melalui voting dan pemilu juga bisa digunakan penguasa untuk memperkuat otoritasnya. Oleh karena itu, pemilu perlu diselenggarakan secara periodik.

Pentingnya pemilu diselenggarakan secara periodik, menurut Jimly Asshiddiqie (2009:10) dikarenakan beberapa sebab:

- a. Pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu, dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai sesuatu kebijakan negara.
- b. Disamping pendapat rakyat bisa berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika dunia internasional ataupun karena faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun faktor eksternal manusia.
- c. Perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena penambahan jumlah penduduk.
- d. Untuk menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan Negara, baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Dengan demikian, cara pandang mengenai fungsi pemilu semakin jelas bahwa pemilu sangatlah kontekstual dengan masyarakat dalam pembentukan pemerintahan, kontrol, dan legitimasi pemerintah yang berkuasa.

Di Negara Indonesia, lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan di bawah pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lembaga KPU ini, memberikan andil yang cukup besar, bahkan sangat strategis dalam mensukseskan

jalannya pesta demokrasi di Indonesia. KPU merupakan badan yang mandiri dalam arti tidak dibawah kekuasaan lembaga negara yang lain. Karena itu untuk menyelenggarakan pemilu, tidak perlu lagi pemerintah mengeluarkan aturan pelaksanaannya, kecuali yang bersifat administratif untuk mempermudah kesiapan teknis karena fungsi sekretariat masih berada pada pemerintah. Pengaturan seperti ini tidak memungkinkan bagi pemerintah untuk dapat melakukan intervensi terhadap penyelenggaraan pemilu. KPU sebagai lembaga mandiri memegang *policy* menjalankan undang-undang pemilu dengan mengeluarkan berbagai keputusan mengikat.

Begitu pula yang terjadi di daerah, lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu di daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Dan saat ini, menurut UU nomor 32 Tahun 2004 sistem pemilihan umum dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Jika dilihat dari perspektif penguatan otonomi daerah dan desentralisasi, Eko Sulisty (2004:20) Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) langsung ini akan menjadi investasi besar bagi proses demokratisasi politik dan budaya politik di daerah ke depan. Disamping itu kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat daerah dapat memperkuat legitimasi kepala daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah. KPUD yang sudah dibentuk berdasarkan UU nomor 12 tahun 2003 diberi kewenangan khusus untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Kewenangan yang diberikan kepada KPUD tidak saja merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tetapi juga diberi kewenangan

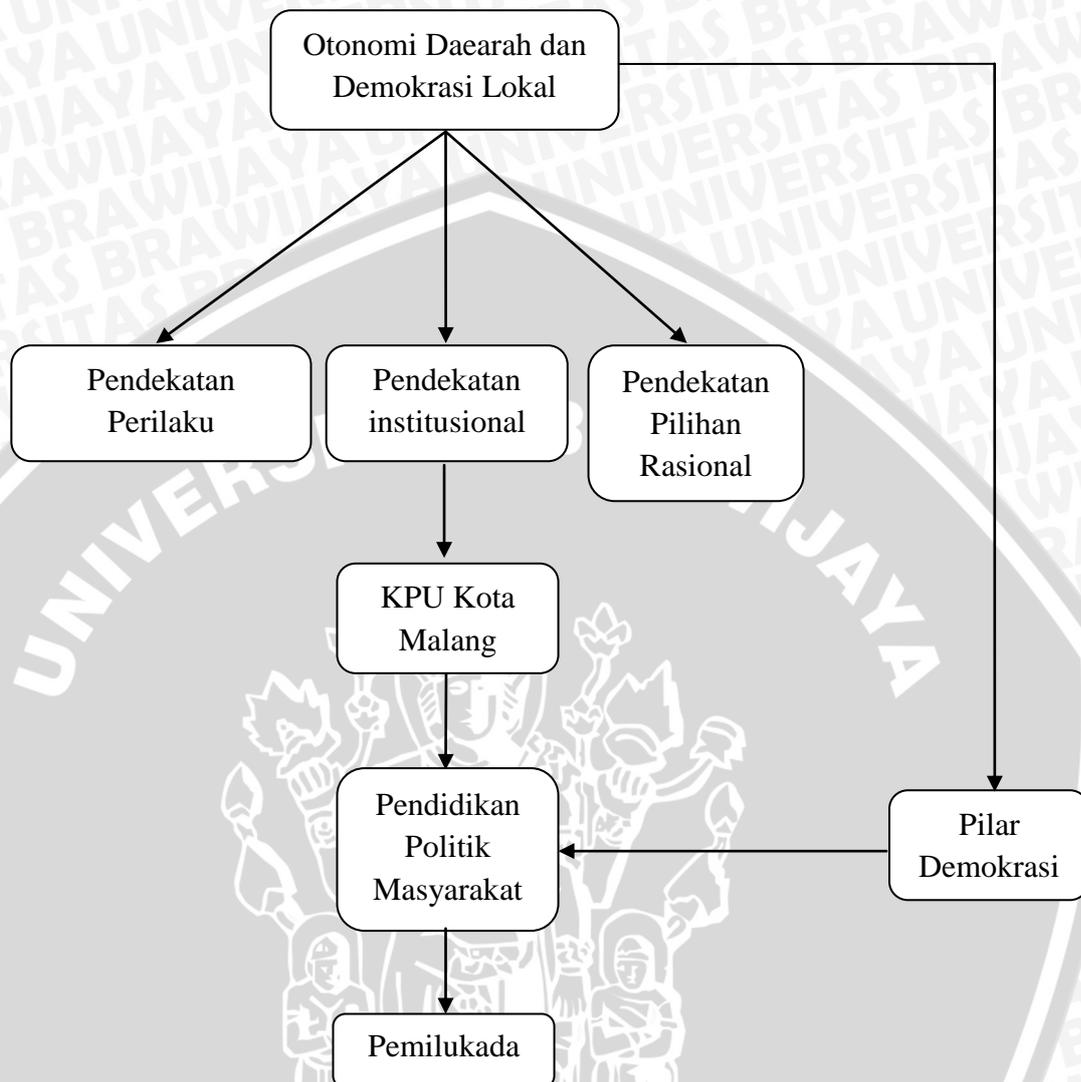
menyusun semua tata cara yang berkaitan dengan tahap persiapan dan pelaksanaan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. KPUD juga bersifat mandiri yang berarti bahwa dalam melaksanakan pemilihan umum tidak berada atau dibawah pengaruh seseorang kelompok, golongan, ataupun pemerintah melainkan semata-mata berdasarkan undang-undang.

Dengan segala yang sudah dipaparkan diatas, maka KPUD sebagai penyelenggara pemilihan umum di daerah, penting untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas sehingga kesuksesan pemilihan umum di daerah dapat terwujud.

2.2. Kerangka Pemikiran

Dalam pelaksanaan penelitian, penulis mencoba merangkapi konsep pemikiran yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian dan juga dalam menyusun laporan hasil penelitian. Kerangka penelitian ini melibatkan beberapa teori besar seperti Otonomi Daerah, Pemilihan Umum, dan Pendidikan Politik.

Penyusunan kerangka pemikiran dalam penelitian ini juga bertujuan untuk tetap memfokuskan penelitian ke dalam objek kajian yang diteliti, agar tidak melebar, sehingga mengakibatkan hasil penelitian yang tidak sesuai dengan konsep awal penelitian. Adapun konsep pemikiran yang dirancang dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.



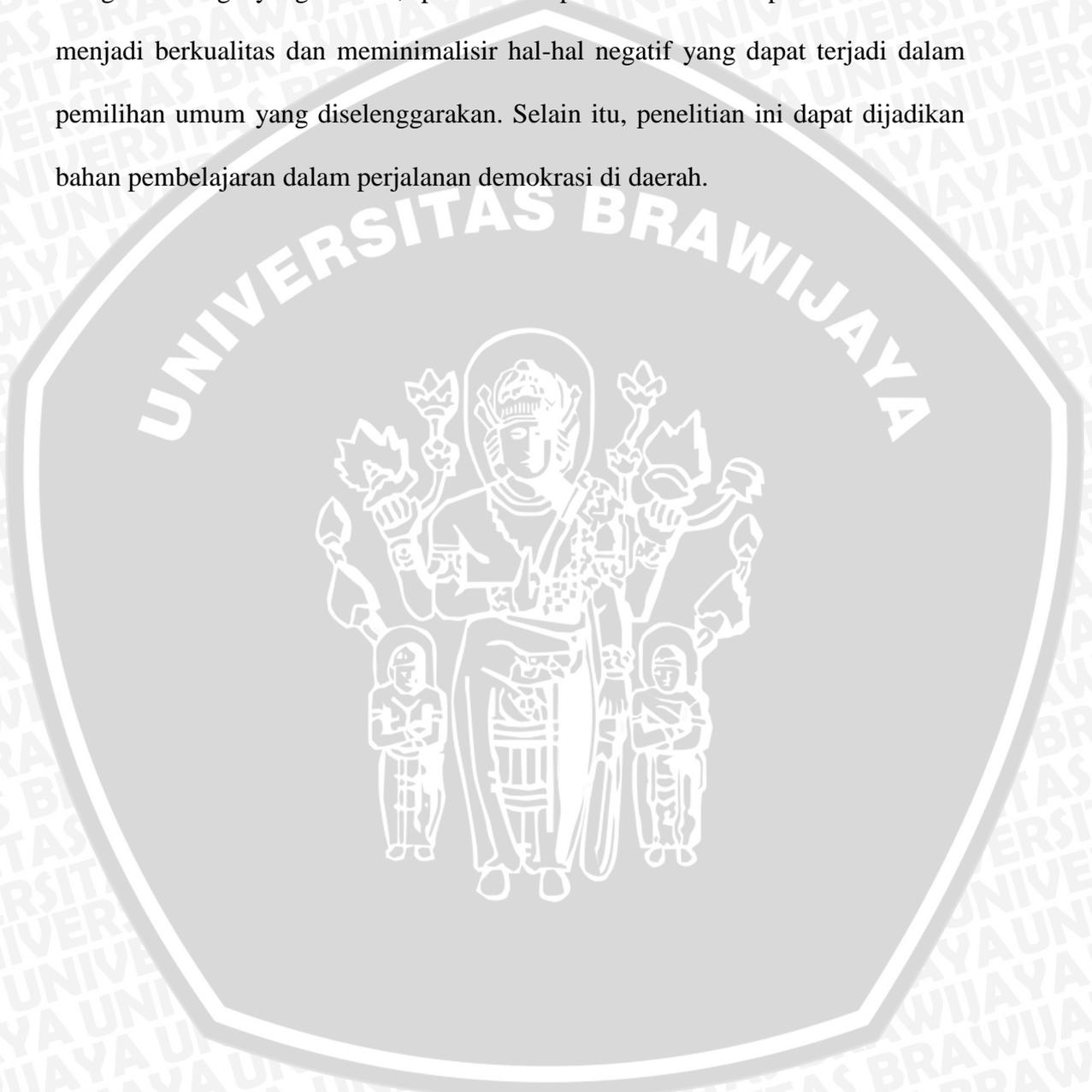
Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Alur pikir yang digunakan dalam penelitian ini bersifat induktif, yaitu dengan penjelasan yang dimulai dari paradigma umum kemudian dikerucutkan kepada spesifikasi yang lebih khusus. Penelitian ini dimulai dengan otonomi daerah dimana sifat otonomi daerah di Indonesia tidak hanya bersifat administratif, tetapi daerah memiliki kewenangan lebih untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Oleh karena daerah otonom di Indonesia memiliki kewenangan yang lebih yaitu dapat mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, maka menjadi suatu keniscayaan munculnya demokrasi lokal di daerah.

Dengan mengamati demokrasi lokal di daerah melalui pendekatan institusional terhadap otonomi daerah di Indonesia, yaitu dalam hal ini KPU daerah kota yang juga merupakan pilar demokrasi, pemilihan umum di daerah dapat terselesaikan. Fungsi pemilihan umum itu sendiri adalah ajang untuk pendidikan politik bagi masyarakat. Mengingat KPU adalah penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan menjalankan pemilihan umum, maka KPU memiliki posisi yang sangat strategis dalam berkontribusi meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat. Inilah hal substansi mengapa KPU perlu mengupayakan peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat.

Pendidikan politik bagi masyarakat sangat diperlukan terutama bagi suatu daerah yang memiliki wilayah yang luas. Dimana juga terdapat masyarakat yang heterogen. Hal ini menambah tantangan bagi upaya meningkatkan pendidikan politik itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan suatu strategi yang dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh KPU dalam upaya peningkatan pendidikan politik masyarakat. Dengan strategi yang efektif, pendidikan politik membuat pemilihan umum menjadi berkualitas dan meminimalisir hal-hal negatif yang dapat terjadi dalam pemilihan umum yang diselenggarakan. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran dalam perjalanan demokrasi di daerah.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975: 5) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.

Menurut David Williams (1995) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah. Jelas definisi ini memberi gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah. Sejalan dengan Denzin dan Lincoln (1987) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari segi pengertian ini, para penulis masih tetap mempersoalkan latar alamiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan yang dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai macam metode penelitian. Dalam penelitian

kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. Definisi ini lebih melihat perpektif emik dalam penelitian yaitu memandang sesuatu upaya membangun pandangan subjek penelitian yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit.

Dari kajian tentang definisi-definisi tersebut dapatlah disintesisikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, dimana metode yang digunakan menekankan pada proses penelusuran data/informasi hingga dirasakan telah cukup digunakan untuk membuat suatu interpretasi. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran maupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif menurut Moh Nazir (2004) adalah untuk membuat deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis,

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Penelitian deskriptif dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain, suatu penelitian yang berusaha, menjawab.

Menurut Lisa Harisson (2009) penelitian kualitatif berusaha menganalisis mengenai perilaku dan sikap politik yang tidak dapat atau tidak dianjurkan untuk dikuantifikasikan. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk deskripsi sehingga hanya memaparkan situasi atau peristiwa untuk kemudian dianalisis melalui teori yang ada. Sementara itu pendekatan metodologis dalam penelitian kualitatif ini adalah metode studi kasus. Menurut Yin (2008: 1), studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial, studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata. Strategi ini juga lebih efektif dan cocok bila pokok permasalahannya berkenaan dengan *how* atau *why*, dimana dalam hal ini tepat dengan keinginan peneliti untuk menggali informasi mengenai bagaimana praktik sosial dan hubungan.

Secara umum studi kasus mempelajari dengan cermat beberapa unit sosial (seperti sebuah perusahaan atau divisi dalam sebuah perusahaan) pada persoalan bisnis nyata upaya untuk menentukan faktor-faktor apa saja yang dapat membuat

kesuksesan dan kegagalan pada sebuah organisasi. Catatan-catatan yang di dapat disertai fakta-fakta yang telah diketahui, Pendapat dan asumsi yang diputuskan dapat dilakukan pada isu-isu bisnis tertentu. Analisa yang lebih detail dan diskusi pada faktor-faktor tersebut akan mengarah pada sebuah perilaku dimana pada akhirnya akan merefleksikan kesuksesan atau kegagalan tersebut. Data yang relevan dikumpulkan, diorganisir, dievaluasi dan digeneralisasikan. Sebuah contoh dari studi kasus adalah melihat bagaimana sebuah manajemen perusahaan menangani sebuah kejadian yang aktual dan menentukan apakah kebijakan yang dirumuskan tersebut sesuai. Jika tidak sesuai maka dibutuhkan rekomendasi yang menawarkan tentang bagaimana hal-hal yang bisa dilakukan lebih baik untuk mejalankan sebuah manajemen perusahaan.

3.2 Lokasi, Objek Penelitian, dan Pelaksanaan Penelitian

Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* (sengaja) namun dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Lokasi penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang. Pemilihan KPU Kota Malang didasarkan pada kesesuaian tema yaitu tentang pendidikan politik masyarakat dan KPU merupakan salah satu elemen penunjang pendidikan politik masyarakat.

Sedangkan pemilihan Kota Malang berdasarkan pada pertimbangan bahwa fakta mengatakan Kota Malang adalah kota terbesar kedua setelah Surabaya di Provinsi Jawa Timur. Sehingga dinamika politik yang terjadi di wilayah ini cenderung lebih berdinamika. Penelitian dilaksanakan pada bulan November Tahun 2012.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian yang berjudul Pendidikan Politik Dan Demokrasi Lokal (Studi Strategi KPU Kota Malang Pada Pemilu 2013) berfokus pada strategi yang dilakukan KPU Kota Malang mengupayakan peningkatan pendidikan politik masyarakat. Penelitian ini menyoroti tentang strategi KPU Kota Malang dalam berkontribusi meningkatkan pendidikan politik masyarakat pada Pemilu Tahun 2013.

3.4 Pemilihan Informan

Dalam penelitian ini penentuan informan diambil secara *purposive sampling* sebagai bagian dari *non-probability sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik. *Purposive sampling* dilakukan dengan sengaja mengambil informan kunci (*key informant*) yang sesuai dengan tujuan penelitian, dalam penelitian kali ini peneliti mengambil dari unsur ketua kelompok, pengurus/anggota. Sampel ini lebih cocok digunakan dalam penelitian kualitatif.

Jumlah Informan dirasa cukup bilamana peneliti sudah merasa tujuan dalam penelitiannya sudah didapatkan semua. Sehingga cara ini tidak dibatasi pada kuantitas Informan tetapi titik kejenuhan dari sebuah informasi. Jumlah informan dalam penelitian kualitatif, utamanya studi kasus, tidak ada aturan yang baku tentang jumlah minimal dari partisipan. Setelah menentukan *key informan* secara disengaja maka peneliti menentukan informan berikutnya dengan cara *snowball sampling* (bola salju). *Snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Adapun informan yang peneliti pilih dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua KPU Kota Malang Hendry. ST. MT.
2. Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Malang Zainudin. ST.
3. Divisi Perencanaan dan Data KPU Kota Malang Alim Mustofa S. Sos

3.5 Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Data Primer

Dalam penelitian ini data primer diambil melalui proses interaksi langsung dengan pihak-pihak partai yang terlibat dalam agenda politik, baik melalui observasi, interview atau wawancara. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli yang dilakukan tanpa melalui perantara, seperti hasil wawancara atau hasil observasi langsung.

b) Data Sekunder

Untuk data sekunder dikumpulkan melalui data-data yang diperoleh dari sumber atau dokumen yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian, baik dari perangkat partai setempat atau dari catatan-catatan peneliti, laporan historis yang tersusun dalam arsip data dokumenter yang berkaitan dengan penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga berdasarkan data yang diperoleh, yaitu:

1. Dokumen-dokumen sebuah studi kasus dapat berbentuk surat-surat, memorandum, agenda, surat administrasi, artikel koran, atau berupa dokumen-dokumen yang relevan untuk diinvestigasi. Dalam kepentingan triangulasi bukti, dokumen-dokumen ini berfungsi untuk menguatkan bukti-

bukti dari sumber lain. Dokumen dapat menyebabkan menyebabkan kepalsuan di tangan para peneliti yang berpengalaman, yang telah menjadi kritik terhadap studi kasus. Dokumen adalah komunikasi antara pihak-pihak dalam penelitian, peneliti sebagai pengamat mengganti serta menjaga pemikiran ini akan membantu peneliti menghindari kesesatkan dari dokumen tersebut.

2. Wawancara adalah salah satu sumber informasi paling penting studi kasus. Ada beberapa bentuk wawancara: wawancara terbuka, wawancara terfokus, dan terstruktur atau survei. Dalam sebuah wawancara terbuka, responden atau sumber informasi diminta memberikan komentar tentang peristiwa-peristiwa tertentu. Mereka dapat mengajukan solusi atau memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Mereka juga dapat menguatkan bukti yang diperoleh dari sumber-sumber lain. Peneliti harus menghindari ketergantungan pada satu informan, dan mencari data yang sama dari sumber lain untuk memeriksa keasliannya. Wawancara terfokus digunakan dalam situasi di mana responden yang diwawancarai untuk waktu singkat, biasanya menjawab pertanyaan pun sudah ditetapkan. Teknik ini sering digunakan untuk mengkonfirmasi data yang dikumpulkan dari sumber lain. Wawancara terstruktur mirip dengan survei, dan digunakan untuk mengumpulkan data dalam kasus-kasus seperti studi lingkungan. Pertanyaan yang rinci dan dikembangkan di muka, sama seperti mereka dalam survei.

3. Observasi atau pengamatan langsung terjadi ketika kunjungan lapangan dilakukan selama studi kasus. Bisa sesederhana kegiatan pengumpulan data kasual, atau protokol formal untuk mengukur dan mencatat perilaku. Teknik ini berguna untuk memberikan informasi tambahan tentang topik yang sedang dipelajari. Keandalan ditingkatkan ketika lebih dari satu pengamat terlibat dalam tugas.

3.7 Teknik analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif (Miles dan Huberman, 1984: 246). Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian di lapangan sampai penelitian data selesai dilakukan. Upaya analisis tersebut dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat diceritakan pada orang lain. Tahap analisis data memegang peranan penting dalam penelitian kualitatif yakni sebagai faktor utama penilaian kualitas penelitian. Aktivitas yang dilakukan peneliti dalam melakukan analisis data adalah data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif berdasarkan hasil wawancara secara *open-ended*, terfokus dan terstruktur, dokumentasi dan observasi secara langsung, kemudian data tersebut di interpretasikan dengan cara reduksi data, penyajian data seta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

1. Reduksi data

Reduksi data yang dilakukan dengan pemilihan data, penyederhanaan dan merubah data dengan tujuan agar data yang telah diperoleh lebih siap untuk diakses, dapat dimengerti dan menggambarkan berbagai macam tema pola. Reduksi data secara langsung memberikan perhatian pada pemusatan, penyederhanaan dan perubahan data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara *open-ended*, wawancara terfokus, wawancara terstruktur, dokumentasi dan observasi secara langsung ke dalam bentuk terperinci, sistematis dan dapat ditonjolkan pokok-pokok yang penting. Reduksi data ini berlangsung selama penelitian dilaksanakan.

2. Penyajian data

Tahap penyajian data dilaksanakan untuk dapat menyampaikan gagasan yang terdapat dalam data yang telah dikelompokkan dan memberikan gambaran pada kesimpulan dari kumpulan informasi yang di dapat dari reduksi data. Penyajian data ini membantu peneliti untuk memahami dan mengamati pola tertentu dari data atau menentukan analisis tambahan maupun tindakan lain yang harus dilakukan.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Proses analisis data terakhir yang dilakukan adalah dengan memberikan gambaran kesimpulan dan verifikasi. Melalui proses penelitian ini, peneliti telah melakukan berbagai pengujian dan informasi yang telah diperoleh selama

penelitian. Pada akhirnya, setelah data selesai dikumpulkan direduksi, disajikan serta dianalisis, kesimpulannya akan muncul dan ditetapkan secara lebih jelas dan pasti.

Kemudian verifikasi dilakukan untuk melakukan pertimbangan ganda. Pertimbangan tersebut berupa gambaran kesimpulan dari pola-pola nyata dari data yang harus ditetapkan untuk meyakinkan bahwa data tersebut benar dan tidak ada proses bias yang dilakukan peneliti. Hal ini akan dilaksanakan peneliti secara seksama dengan memeriksa arah menuju kesimpulan. Secara lebih detail proses analisa data model Miles and Huberman digambarkan pada gambar 2



Catatan Lapangan / Raw Material

6v1n%TYDX%\$#&*3@Nh7bneBVF
R*+=09(*&PO*HVDC216548BGMb
#^*Lngtsb0OY* &^!rDVo3tup



Reduksi Data:

Memilih yang penting, membuat kategori (huruf besar, huruf kecil, angka),
membuang yang tidak dipakai

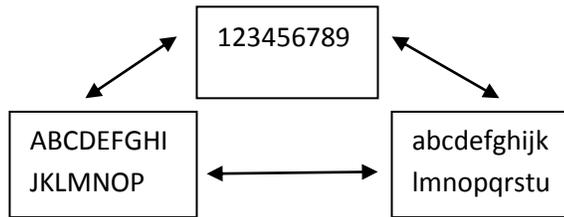
VTYDXNBVFRHOV
DCDGASQBNLOY
DFVGSTURTFGHJ
KLOMNHIOLEWF

ndjghtewqaidofkbjd
hwplmnsrtiygklos
waqzxsabnmvfrtyup
lkjmnhgkltlwqcxum

3217120984795910
9233118940393857
4629204848749303
9484930204879009



Data Display: menyajikan ke dalam pola



Conclusion Drawing/Verification:

Memilih yang penting, membuat kategori (huruf besar, huruf
kecil, angka), membuang yang tidak dipakai

Gambar 2. Analisa Data Model Miles and Huberman

Sumber: Prof. Dr. Sugiyono (2011: 248)

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Kota Malang

Kota Malang adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur Indonesia. Kota ini berada di dataran tinggi cukup sejuk terletak pada 90 km sebelah selatan kota Surabaya dan wilayahnya di kelilingi oleh Kabupaten Malang. Malang merupakan kota terbesar kedua di utara timur dan di kenal dengan julukan kota pelajar.

Kota malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum di rencanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif itu masih berbekas hingga sekarang. Misalnya Ijen Boulevard kawasan sekitarnya, hanya dinikmati oleh keluarga- keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang bagai monumen yang menyimpan misteri dan seringkali mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim disana untuk bernostalgia.

Pada Tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan

berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

Sejalan perkembangan tersebut di atas, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaannya. Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu diabaikan.

Kota Malang juga merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan kota besar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Sebagai kota besar, Malang tidak lepas dari permasalahan sosial dan lingkungan yang semakin buruk kualitasnya. Kota yang pernah dianggap mempunyai tata kota yang terbaik diantara kota-kota Hindia Belanda ini, kini banyak dikeluhkan warganya seperti kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas, suhu udara yang mulai panas, sampah yang berserakan atau harus merelokasi pedagang kaki lima yang memenuhi alun-alun kota. Namun terlepas dari berbagai permasalahan tata kotanya, pariwisata Kota Malang mampu menarik perhatian tersendiri. Dari segi geografis, Malang

diuntungkan oleh keindahan alam daerah sekitarnya seperti Batu dengan agrowisatanya, pemandian Selecta, Songgoriti atau situs-situs purbakala peninggalan Kerajaan Singosari. Jarak tempuh yang tidak jauh dari kota membuat para pelancong menjadikan kota ini sebagai tempat singgah dan sekaligus tempat belanja. Perdagangan ini mampu mengubah konsep pariwisata Kota Malang dari kota peristirahatan menjadi kota wisata belanja.

Secara geografis wilayah Kota Malang berada antara $07^{\circ}46'48''$ - $08^{\circ}46'42''$ Lintang Selatan dan $112^{\circ}31'42''$ - $112^{\circ}48'48''$ Bujur Timur, dengan luas wilayah 110,06 km² dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Batas Utara: Kabupaten Malang
2. Batas Selatan: Kabupaten Malang
3. Batas Timur: Kabupaten Malang
4. Batas Barat: Kabupaten Malang

Kota Malang terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Kedungkandang, Klojen, Blimbing, Lowokwaru, dan Sukun serta 57 kelurahan. Daerah penyelidikan mempunyai elevasi antara 300 - 1.694 m di atas muka air laut dan secara morfologi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) satuan morfologi, yaitu satuan morfologi dataran yang menempati bagian tengah dan selatan, satuan morfologi pebukitan bergelombang menempati bagian timur dan utara, dan satuan morfologi pegunungan menempati wilayah bagian barat, utara dan timur. Karena letaknya yang cukup tinggi, Kota Malang memiliki udara yang sejuk dengan suhu rata-rata

24,13°C dan kelembaban udara 72% serta cerah hujan rata-rata 1.883 milimeter per tahun.

Tabel 1. Luas Wilayah Kota Malang

No	Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Kedungkandang	36,89
2	Klojen	8,83
3	Blimbing	17,77
4	Lowokwaru	22,60
5	Sukun	20,97
Total		110,06

Sumber : Litbang Kompas diolah dari BPS Kota Malang 2001

Secara geologi daerahnya disusun oleh batuan hasil kegiatan gunungapi yang terdiri dari tufa, tufa pasir, breksi gunung api, aglomerat, dan lava. Secara hidrogeologi akumulasi air tanah di Cekungan Malang dijumpai pada lapisan akuifer yang dapat dipisahkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu kelompok akuifer dengan kedalaman kurang dari 40 m, kelompok akuifer dengan kedalaman antara 40 - 100 m, dan kelompok akuifer dengan kedalaman antara 100 - 150 m.

Dalam kurun waktu 6 tahun dari tahun 1998 sampai tahun 2003, jumlah penduduk Kota Malang tidak mengalami kenaikan yang cukup nyata. Pada tahun 1998, penduduk Kota Malang berjumlah 708.907 jiwa, dan menjadi 763.465 jiwa pada akhir tahun 2003. Pertumbuhan penduduk rata-rata adalah 0,17%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2003, yaitu sebesar 0,33%, sedangkan pertumbuhan terendah sebesar 0,01% terjadi pada tahun 2002. Dan data terakhir

tahun 2008 sebesar 816.637 jiwa yang terdiri dari 404.664 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 411.973 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.420 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan (Klojen = 126.760 jiwa, Blimbing = 171.051 jiwa, Kedungkandang = 162.104 jiwa, Sukun = 174.868 jiwa, dan Lowokwaru = 181.854 jiwa). Terdiri dari 57 Kelurahan, 526 unit RW dan 3935 unit RT.

4.2 KPU Kota Malang

KPU Kota Malang yang berada di Jalan Bantaran nomor 6 ini merupakan wilayah yang cukup strategis dalam menjangkau seluruh wilayah kota Malang mengingat letaknya yang berada di kawasan sentral Kota Malang. Sehingga hal ini memudahkan KPU Kota Malang dalam melakukan berbagai aksi terkait penyelenggaraan pemilihan umum.

4.2.1 Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.2.2 Misi

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum,

2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab,
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif,
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

4.2.3 Kode Etik

Pasal 11 bab V Peraturan Nomor 31 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyelenggara KPU

1. Penyelenggara Pemilihan Umum harus menggunakan kewenangan berdasarkan hukum,
2. Penyelenggara Pemilihan Umum harus bersikap dan bertindak berpartisipasi dan imparisial,
3. Penyelenggara Pemilihan Umum harus bertindak transparan dan akuntabel;

4. Penyelenggara Pemilihan Umum harus melayani pemilih menggunakan hak pilihnya,
5. Penyelenggara Pemilihan Umum tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan,
6. Penyelenggara Pemilihan Umum harus bertindak profesional dan administrasi pemilihan umum harus akurat.

4.2.4 Tugas dan wewenang

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Undang- undang nomor 32 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota dalam menyelenggarakan Pemilu adalah :

1. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

- g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- m. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;

- n. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan KPU Kabupaten / Kota kepada masyarakat;
 - p. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
 - q. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau undang-undang.
2. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;

- f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- i. memeriksa pengaduan dan/ataulaporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- k. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- m. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

n. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.

3. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya;

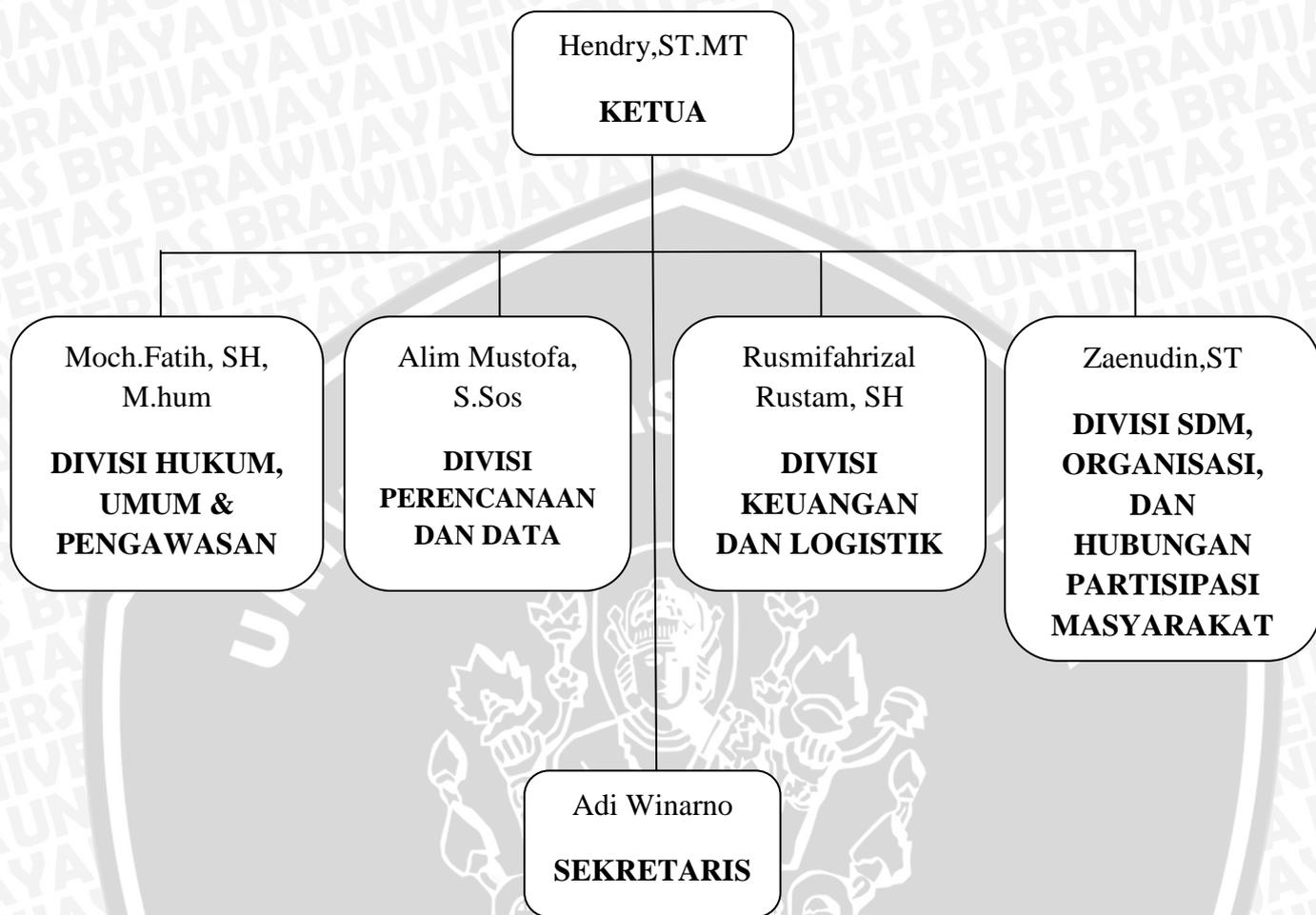
e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;

- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- m. mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat berita acaranya;
- n. melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode

- etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- p. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- q. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- u. menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang

4. KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban:
 - a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan
 - j. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.



Gambar 5. Susunan Organisasi KPU Kota Malang

Sumber: Arsip KPU Kota Malang 2013

BAB V

STRATEGI PENDIDIKAN POLITIK

5.1 Proses Pemilukada Kota Malang

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Malang telah sekian lama bergulir. Dan setiap perguliran pemilukada Kota Malang selalu menarik untuk diikuti. Terlebih dalam setiap pemilukada banyak hal yang bisa dijadikan pembelajaran khususnya untuk kualitas demokrasi bangsa Indonesia kedepan. Diharapkan setiap perguliran pemilukada, warga masyarakat semakin bertambah cerdas dalam memeriahkan pesta demokrasi rakyat ini. Dalam artian warga masyarakat semakin mengerti, memahami pentingnya pemilukada yang berdampak pada corak pemerintahan dan nasib mereka kedepan.



Gambar 6. Logo Pemilukada Kota Malang

Sumber: Arsip KPU Kota Malang 2013

Berdasarkan Keputusan KPU Kota Malang tentang Tahapan, Program dan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang 2013, bahwa pelaksanaan Pemilukada Kota Malang 2013 dimulai 24 Oktober 2012 sampai 23 Juli 2013. Dimana KPU setelah melakukan tahap persiapan yang dimulai pada tanggal 24 Oktober 2012 sampai tanggal 17 November 2012, selanjutnya KPU melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih. Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di daerah dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Kota Malang, digunakan sebagai data awal daftar pemilih untuk Pemilukada Kota Malang Tahun 2013. Daftar pemilih tersebut dimutakhirkan dan divalidasi oleh PPS dengan dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Hasil pemutakhiran DP4 tersebut disusun menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), kemudian DPS tersebut diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah terjangkau oleh masyarakat untuk mendapat tanggapan dari masyarakat sehingga dapat memberikan kesempatan kepada hak pilih yang belum terdaftar sebagai pemilih. Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang telah diperbaiki disahkan dan diumumkan oleh PPS untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dari hasil pemutakhiran data pemilih di wilayah kecamatan se-Kota Malang diketahui bahwa jumlah hak pilih berdasarkan DPT pada Pemilukada Kota Malang Tahun 2013 adalah sebanyak 612398 hak pilih yang terdiri dari 300314 laki-laki dan 312251 perempuan.

Tahapan selanjutnya yang dilaksanakan KPU Kota Malang pada pemilukada 2013 yaitu tahapan pendaftaran pasangan calon. Pada Pemilukada Kota Malang Tahun 2013, KPU Kota Malang menetapkan 6 (enam) pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Kota Malang Tahun 2013 yang memenuhi persyaratan. 2 (dua) pasang Calon dari Perseorangan dan 4 (empat) pasang calon yang diusung oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2 tentang daftar calon walikota dan wakil walikota pada pemilukada Kota Malang tahun 2013.

Tabel 2. Daftar calon Walikota dan Wakil Walikota Malang tahun 2013

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	KETERANGAN
1	DWI CAHYONO, SE – MUHAMMAD NUR UDDIN, S.Pt	Calon Perseorangan
2	SRI RAHAYU – PRIYATMOKO OETOMO	Calon dari Partai Politik
3	Dra. H. HERI PUJI UTAMI, M.A.P – Ir. H. SOFYAN EDY JARWOKO	Calon dari Partai Politik
4	MUJAIS SUHUD – YUNAR MULYA	Calon Perseorangan
5	AGUS DONO – ARIF H.S	Calon dari Partai Politik
6	H. MOCHAMAD ANTON – SUTIAJI	Calon dari Partai Politik

Sumber: KPU Kota Malang tahun 2013

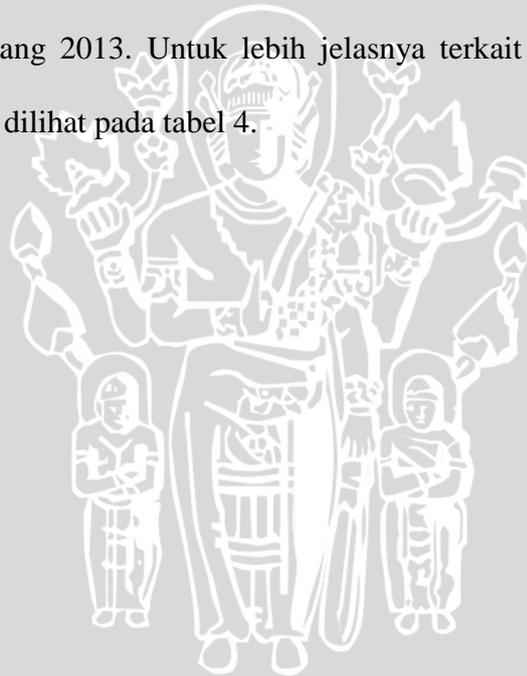
Dalam rangka mewujudkan kepemimpinan daerah yang demokratis yang memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, penyelenggaraan pemilihan kepala pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Partai Politik/ gabungan Partai Politik

didaftarkan oleh Partai Politik / gabungan Partai Politik kepada KPU Kota Malang selama masa pendaftaran dengan menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan Parpol atau gabungan Parpol sekaligus mendaftarkan Tim Kampanye, sedangkan untuk yang berasal dari Calon Perseorangan/Independen dapat secara langsung mendaftar ke KPU Kota Malang. Dalam penetapan calon, KPU dan Panwaslu Kota Malang melakukan penelitian terhadap surat pencalonan serta melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan. Apabila dari hasil penelitian telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan KPU Kota Malang, selanjutnya KPU menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan mengumumkannya.

Sementara itu, salah satu tahapan dalam pemilukada adalah kampanye. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya dari pasangan calon untuk meyakinkan para pemilih dengan cara menyampaikan visi, misi dan program masing-masing pasangan calon yang dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara (masa tenang). Kampanye dilakukan dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka/dialog/ rapat umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, Penyebaran melalui media cetak dan elektronik dan sebagainya. Pada Pemilukada Kota Malang Tahun 2013 ini kampanye akan berlangsung mulai tanggal 5 Mei 2013 sampai 19 Mei 2013.

Tahapan terakhir dari pemilukada yang dilakukan oleh KPU Kota Malang yaitu tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Pelaksanaan pemungutan suara

Pemilukada yang dilaksanakan tanggal 23 Mei 2013. KPU Kota Malang menetapkan pasangan Anton-Sutiaji (AJI) sebagai pemenang Pemilukada Kota Malang 2013, melalui Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pemenang Pemilukada Malang 2013 di pada tanggal 29 Mei 2013. Penetapan itu, berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan surat suara yang dilakukan KPU 28-29 Mei 2013. Ketua KPU Malang, Hendry, menyatakan SK KPU Malang nomor 18/KPTS/KPU Kota/014329991/2013 mengesahkan pasangan H. Mochamad Anton – Sutiaji sebagai pemenang Pemilukada. Setelah pengesahan itu, selesai sudah rangkaian pemilukada Kota Malang 2013. Untuk lebih jelasnya terkait dengan perolehan prosentase suara dapat dilihat pada tabel 4.



Tabel 4. Prosentase perolehan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 5 kecamatan kota Malang

NO	Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase Hasil Perolehan Suara
1	H.Dwi Cahyono,SE-Muhammad Nur Uddin,Spt	5,84 %
2	Dra.Hj.Sri Rahayu-Drs.Ec,RB Priyatmoko Oetomo,MM	22,25 %
3	Dra.Hj.Heri Pudji Utami,M.AP-Ir.Sofyan Edi Jarwoko	18,17 %
4	Mujais-Yunar Mulya	2,50 %
5	Drs.Agus Dono W.M.Hum-Ir.Arif HS,MT	3,91 %
6	H.Moch.Anton-Sutiaji	47,33 %

Sumber: KPU Kota Malang 2013

5.2 Perbandingan Rumusan Pengertian Pendidikan politik

Sebelum menganalisis lebih jauh tentang strategi dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, maka perlu diketahui terlebih dahulu rumusan pengertian pendidikan politik itu sendiri. Karena hal tersebutlah yang membentuk perilaku yang terejawantahkan dalam implementasi program-program pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat, terutama fokus penelitian yang menjadi hal utama dalam skripsi ini. Penulis akan memulai bahasan

mengenai pengertian pendidikan itu sendiri. Pada dasarnya pengertian pendidikan ditinjau dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) No.20 tahun 2003 yaitu pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan darinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia tentang pengertian pendidikan, kata pendidikan berasal dari kata 'didik' dan mendapat imbuhan 'pe' dan akhiran 'an', maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Sedangkan Pendidikan Menurut Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Nasional Indonesia menjelaskan mengenai pengertian pendidikan, Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.

Dari beberapa pengertian pendidikan di atas, pada dasarnya pengertian pendidikan yang dikemukakan memiliki kesamaan yaitu usaha sadar, terencana, sistematis, berlangsung terus-menerus, dan menuju kedewasaan. Dan inti tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter

sehingga memiliki pandangan yang luas kedepan untuk mencapai suatu cita- cita yang di harapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Karena pendidikan itu sendiri memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan.

Politik itu sendiri terdapat berbagai macam pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Tetapi dalam hal ini politik lebih dicondongkan dan konteks pengelolaan kekuasaan dalam Negara yang melibatkan partisipasi masyarakat. Miriam Budiarmo, 2008:13 menyebutkan Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau *politics* atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia kita teringat pepatah *gemah ripah loh jinawi*. Orang Yunani kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai *en dam onia* atau *the good life*. Lebih dalam lagi, bahwa politik dalam suatu Negara (*state*) berkaitan dengan masalah kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan publik (*public policy*), dan alokasi atau distribusi (*allocation or distribution*). Namun demikian, pengertian politik sebagai usaha untuk mencapai suatu masyarakat yang lebih baik daripada yang dihadapinya, atau yang disebut Peter Merkl yakni politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan, meskipun terlihat samar-samar pun tetap hadir sebagai latar belakang serta tujuan kegiatan politik. Tentu perlu disadari bahwa persepsi mengenai baik dan adil dipengaruhi oleh nilai-nilai serta ideologi masing-masing dan zaman yang bersangkutan.

Penggabungan antara pendidikan dan politik yang menjadi pendidikan politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengejawantahan pendidikan politik berupa aktifitas-aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Pendidikan politik meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, meliputi juga loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Disamping itu, ia bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakatnya. Pendidikan politik merupakan aktifitas yang terus berlanjut sepanjang hidup manusia dan itu tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang bebas. Dengan demikian pendidikan politik memiliki tiga tujuan yaitu membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik.

Sedangkan pengertian pendidikan politik bagi KPU Kota Malang seperti yang diungkapkan ketua KPU Kota Malang, Hendry ST.MT.

“...bagi KPU, pendidikan politik itu adalah memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat sehingga mereka memilih dengan rasional dengan sadar bukan dengan tidak tahu apa-apa, seperti ikut-ikutan. Intinya bagi KPU pendidikan politik itu memberikan pemahaman wawasan dan membangun kesadaran masyarakat agar terlibat salah satunya dalam pemilukada itu...” (sumber: wawancara pada hari Senin 08/04/2013 pukul 09.30 WIB)

Penjelasan tersebut juga serupa dengan penjelasan dari komisioner divisi perencanaan dan data KPU Kota Malang, Alim Mustofa S.Sos.

“...berbicara pendidikan politik yaitu penyadaran kepada masyarakat menggunakan hak pilihnya. Diharapkan masyarakat ingat bahwa mereka sudah terdata, minimal itu dulu. Itu salah satu unsur pendidikan politik. Minimal mereka itu ingat hak politiknya...” (sumber: wawancara pada hari Rabu 10/04/2013 pukul 09.30 WIB)

Dari pengertian diatas, maka dapat dibandingkan adanya perbedaan mengenai wilayah cakupan pengertian pendidikan politik antara teori yang didapat peneliti dengan yang KPU Kota Malang ungkapkan. Wilayah cakupan pengertian pendidikan politik bagi KPU belum memenuhi wilayah cakupan pendidikan politik secara utuh. Dimana KPU hanya berorientasi pada banyaknya jumlah masyarakat yang mencoblos pasangan calon kepala daerah pada saat hari pencoblosan berlangsung. Hal ini masih merupakan bagian kecil dari pendidikan politik itu sendiri. Pendidikan politik bukan hanya berbicara penggunaan hak pilih masyarakat melainkan pendidikan politik itu juga bisa membuat masyarakat memiliki kepribadian politik yang kokoh.

5.3 Pandangan KPU terhadap Masyarakat

Setelah mengetahui pengertian mengenai pendidikan politik yang dipahami oleh KPU, seperti yang telah diungkapkan di atas, bahwa pengertian pendidikan politik tersebut berpengaruh terhadap bentuk-bentuk kegiatan pemberian pendidikan politik kepada masyarakat yang dilakukan oleh KPU. Bentuk-bentuk kegiatan pemberian pendidikan politik kepada masyarakat yang dilakukan oleh KPU tentunya berawal dari strategi yang telah direncanakan sebelumnya. Namun, sebelum terlalu jauh berbicara tentang strategi KPU untuk melakukan aksinya dalam memberikan pendidikan politik masyarakat, maka

merupakan sebuah keniscayaan untuk terlebih dahulu memahami medan dalam hal ini adalah gambaran masyarakat umum.

Proses demokratisasi di Indonesia merupakan amanat pembangunan politik yang dilematis, dimana apa yang terjadi dimasyarakat tidak lagi sama dengan apa yang diharapkan oleh teori-teori pembangunan masyarakat yang demokratis. Masyarakat tidak mengerti nilai demokrasi, masyarakat hanya tau nilai ekonomi karena memang pemerintah telah gagal dalam membangun kesejahteraan dan sumber daya manusia masyarakatnya sendiri. Sehingga demokrasi menjadi sesuatu yang berat, bahkan mungkin merupakan bentuk pemerintahan yang paling rumit dan sulit. Disamping itu, demokrasi menuntut dialog, partisipasi, tanggung jawab dan juga solidaritas, di samping moralitas dan etika.

Setiap menjelang pemilihan umum calon kandidat peserta pemilu berlomba-lomba untuk mendapatkan suara, tidak heran jika proses transaksional pun dianggap sebagai langkah jitu untuk menjadi penguasa. Nilai kepemimpinan terletak pada seberapa banyak uang yang ia punya, ideologi-pun bukan lagi menjadi masalah dalam menentukan masa depan bangsa, karena yang berkuasa adalah jual beli suara. Sama hal dengan proses jual beli di pasar, begitu juga proses transaksi suara yang mana siapa yang berani membeli dengan harga yang mahal maka suara akan diberikan, tidak peduli suara dari siapa, karena setiap suara dinilai sama.

Ini adalah gambaran yang terjadi dimasyarakat, dimana jabatan, kekuasaan, kepemimpinan diperoleh dengan cara tawar menawar harga. Hal ini serupa dengan yang diungkapkan oleh komisioner divisi perencanaan dan data KPU Kota Malang, Alim Mustofa S.Sos.

“...Masyarakat memandang bahwa ketika ngomong politik, pasti ngomong uang. Dan mereka kadang-kadang tidak bersemangat kalau tidak ada uang. Malah KPU yang sedang woro-woro terkait memeberikan pendidikan politik dikira partai. Mana kausnya? Mana uangnya? kita bilang gak ada. Jadi parahnya seperti itu sekarang ini. Karena sudah sangat transaksional masyarakatnya..” (sumber: wawancara pada hari Rabu 10/04/2013 pukul 09.30 WIB)

Pemilihan umum merupakan sebuah hal yang sangat unik dalam masyarakat kita, para calon pemimpin bangsa bergegas menghampiri rakyatnya, bukan menawarkan ideologi namun menawarkan harga, begitu juga dengan masyarakatnya lekas mencari tawaran harga untuk diperolehnya. Masa depan negeri ini berada pada ujung paku pencoblosan dalam pemilihan umum, satu tusukan dihargai sama, bukan dilihat dari nilai kepintarannya namun dilihat dari nilai ekonomisnya. Proses transaksional ataupun jual beli suara bukan hanya karena kepentingan orang yang haus akan kekuasaan tapi juga kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan harganya. Hal ini sungguh menyedihkan dimana bukan lagi mereka yang mencari untuk membeli suara namun masyarakat yang menawarkan diri berapa harga suara untuk dibeli.

Selain itu, kesadaran politik setiap masyarakat yang sangat berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya dikarenakan berbagai faktor akhirnya akan menghasilkan pemikiran masyarakat yang apatis dan sebaliknya aktif, memiliki

kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya Pemilu. Orang-orang yang apatis menganggap kegiatan berpolitik sebagai sesuatu yang sia-sia, sehingga sama sekali tidak ada keinginan untuk beraktivitas di dunia politik. Sikap apatis masyarakat terhadap politisi menjadi penyebab utama golongan putih (golput), golput diartikan sebagai pilihan politik warga negara untuk tidak menggunakan hak pilih, hal ini berkaitan dengan partisipasi politik. Keinginan golput merupakan pilihan yang dilakukan secara sadar, karena kenyataannya dari dulu mulai kampanye hingga pemilihan akhirnya semua tetap sama saja, sehingga adanya sebagian orang yang mengabaikan Pemilu. Hal ini senada dengan yang disampaikan Zainudin ST, komisioner divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat KPU kota Malang.

“...Bahwa masyarakat terutama di kota Malang itu ada indikasi titik jenuh ketika pemilihan umum itu dilakukan secara berduyun-duyun...” (sumber: wawancara pada hari Senin 08/04/2013 pukul 13.00 WIB)

Tingkat kejenuhan masyarakat yang tinggi dianggap sebagai faktor penting yang membuat tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum berkurang. Turunnya tingkat partisipasi masyarakat pastinya menjadikan tantangan untuk KPU dan partai politik. Beberapa alasan kurangnya partisipasi antara lain, jenuh terhadap pemilu, merasa pemimpin yang terpilih tidak bisa membawa perubahan yang signifikan bahkan tayangan yang menunjukkan perilaku pemimpin terkadang di anggap mengecewakan seperti korupsi dan lainnya. Orang-orang yang bersikap apatis terhadap kegiatan berpolitik di karena sebagian masyarakat yang sama sekali tidak memahami hakikat politik sesungguhnya.

Apatisme adalah sikap masyarakat yang masa bodoh dan tidak mempunyai minat atau perhatian terhadap orang lain, keadaan, serta gejala-gejala sosial politik pada umumnya. Apatisme merupakan sikap acuh tak acuh terhadap sebuah hal, dalam hal ini adalah politik. Apatisme masyarakat terhadap politik dilatar oleh dua aspek yaitu rendahnya kepercayaan terhadap politik yang berlangsung dan rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap politik. Dalam beberapa kasus apatisme masyarakat terhadap politik khususnya di Indonesia, terjadi disebabkan oleh kesenjangan antara masyarakat dan elit politik. Diantara mereka terjadi distorsi kepentingan, dimana elit politik selalu menjadikan kelompok masyarakat menjadi objek pencapaian kepentingannya dan cenderung mengorbankan kepentingan masyarakat. Hal ini sebenarnya harus dihindari bahwa politisi seyogyanya tidak menjadikannya elit dan jauh dari masyarakat, justru yang memegang kekuasaan tertinggi adalah masyarakat itu sendiri dan politisi seharusnya menjadi pelayan masyarakat dan penyambung lidah rakyat untuk kepentingan bersama dalam berbangsa dan bernegara.

Kesadaran politik berarti sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sikap dan kepercayaan terhadap pemerintah lebih kepada penilaian seseorang terhadap pemerintah, apakah pemerintah dapat dipercaya atau tidak. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah yang tinggi, partisipasi politik cenderung aktif. Sebaliknya, apabila kesadaran dan kepercayaan rendah terhadap pemerintah, partisipasi politik cenderung pasif dan tertekan atau apatis. Salah satu alasan yang menyebabkan sikap apatis pada masyarakat umumnya adalah dengan adanya anggapan pada

individu dan masyarakat bahwa partisipasi politik adalah hal sia-sia karena tidak pernah efektif. Pola pikir masyarakat melihat elite politik yang senantiasa selalu membodohi masyarakat dan masyarakat yang mempunyai pengalaman dan pemahaman bahwa pemerintah dan elit politik, baik tingkat pusat maupun daerah, selama ini tidak mampu melakukan perubahan sosial politik bagi perbaikan nasib rakyat banyak. Masyarakat yang umumnya ada perasaan terasingkan dari politik atau pemerintahan dan cenderung berpikir bahwa pemerintahan dan politik hanya dilakukan oleh dan untuk orang lain, jadi merasakan dan memandang berbagai kebijakan elit politik atau pemerintah tidak lagi bersesuaian dengan sikap dan pemikiran politiknya atau kepentingan rakyat banyak.

Kepentingan politik sebenarnya adalah semata-mata untuk membuat tercapainya keinginan dan kepentingan rakyat banyak. Masyarakat atau rakyat akan memilih wakil-wakilnya untuk kepentingan mereka, dan wakil-wakilnya tersebut semata-mata bekerja dan berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan masyarakat pemilihnya tersebut. Namun sekarang terjadi paradox kepentingan politik dimana proses politik tersebut menimbulkan distorsi kepentingan dan menjadikan dua pihak yang berbeda serta melahirkan elit politik yang sesungguhnya mereka hanya sebagai pelayan dan mewakili kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat dan elit politik akhirnya jauh berbeda, akhirnya masyarakat yang selalu menjadi korban kebijakan politik yang sedang berkuasa. Wakil Rakyat yang seharusnya mengusung kepentingan rakyat nyatanya menjadi musuh rakyat karena hanya mengusung kepentingan kelompok dan pribadinya semata. Masyarakat memandang elite politik tidak mengalami

perubahan yang jelas. Ada sebagian masyarakat yang sangat mengerti sekali dengan politik tetapi pemilu tak ubahnya hanya sandiwara politik karena hakikatnya, pemilu hanya akan menguntungkan secara politik dan ekonomi kepada elit politik. Golput muncul karena berdasarkan bahwa keberadaan pemilu dan aktivitas memilih tidak akan berdampak lebih baik pada diri pemilih. Hal ini terjadi ditengah masyarakat yang terjebak pada apatisme. Kecenderungan ini muncul ketika norma-norma sosial yang selama ini disepakati dan dijabarkan dalam suatu masyarakat mengalami kelonggaran, kegoyahan, dan kehilangan fungsinya yang efektif. Golput bukanlah pilihan tepat dan cenderung mendorong masyarakat menjadi apatis. Kondisi ini bisa menciptakan rendahnya legitimasi pemerintah serta mendorong munculnya masyarakat yang antipati (ketidaksukaan untuk sesuatu atau seseorang), terhadap perkembangan politik. Dampaknya akan mendorong lemahnya sarana-sarana politik formal yang ada saat ini.

Akhirnya, melihat kondisi masyarakat yang demikian tersebut, KPU kota Malang khususnya sepakat bahwa kondisi transaksional dan apatis masyarakat terhadap politik harus dikembalikan kepada kondisi aktif dan kondisi idealis dalam praktek politik di Indonesia. Tidak boleh lagi terjadi pembohongan dan membodohi masyarakat untuk kepentingan elit politik, semua kepentingan harus bersandar pada kepentingan rakyat banyak. Kita tingkatkan kembali kesadaran masyarakat untuk berpolitik dan merubah citra parpol dan politik di mata masyarakat. Hal tersebut tentunya merupakan tanggungjawab kita bersama, masyarakat, para pemimpin, politisi, akademisi, pengamat, dan khususnya para

generasi muda yang menginginkan terjadinya perubahan kearah yang lebih baik untuk kemajuan dan cita-cita bangsa.

5.4 Strategi KPU Kota Malang dalam Memberikan Pendidikan Politik Masyarakat

Setelah mengetahui kondisi masyarakat yang telah dijelaskan diatas, Maka KPU Kota Malang menyiapkan segenap strategi guna melancarkan aksi dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Menyikapi hal tersebut KPU Kota Malang melakukan banyak hal untuk masyarakat. Seperti yang Zainudin ungkapkan, selaku komisioner divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat beliau mengungkapkan

“... Banyak cara dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Kami mensosialisasikan kepada masyarakat banyak hal. Yang pertama mengenai teknis dan cara pemilu.itu kami lakukan. Misalkan bagaimana tata cara mencoblos, bagaimana sistem pencalonan,bagaimana itu kampanye..” (sumber: wawancara pada hari Senin 08/04/2013 pukul 13.00 WIB)

Pada Pemilu pada 2013, KPU berusaha menyiapkan banyak kegiatan untuk memaksimalkan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini dilakukan mengingat segmentasi masyarakat kota malang sangat beragam dan dinamis. Diharapkan dari banyaknya macam-macam bentuk kegiatan pendidikan politik masyarakat oleh KPU, dapat mengcover sekian banyak segmentasi masyarakat yang ada di kota Malang. Meskipun KPU Kota Malang banyak menyiapkan berbagai bentuk kegiatan untuk pendidikan politik masyarakat, KPU Kota Malang

tetap menggunakan perangkat yang sudah ada. Lebih lanjut Zainudin menambahkan

“...Saya kira, dengan perangkat yang sudah ada kami berprinsip mengoptimalkan yang sudah ada. Karena kalau harus menambah dan tetek bengek itu kaitannya harus mengubah undang-undang. Itulah petama kami punya perangkat itu sampai ditingkat kelurahan. Disitu ada 3 orang PPS. Ditingkat kecamatan kami punya 5 orang anggota PPK. Nah, perangkat kami dibawah inilah yang mensosialisasikan. Mereka penjadi tim pelaksana disitu. Ketika kami sosialisasi ditingkat kelurahan maka tenaga kami PPS ini mereka yang harus menyiapkan segala sesuatunya...” (sumber: wawancara pada hari Senin 08/04/2013 pukul 13.00 WIB)

Namun disisi lain Zainudin juga mengungkapkan yakni yang perlu diingat bahwa penyelenggaraan pemilu yang kaitannya dengan hal teknis dan lain sebagainya itu sendiri juga sudah luar biasa. Lebih lanjut diungkapkan

“...Bisa dibayangkan dalam satu waktu kami mengerjakan tiga tahapan yang berbeda. Sekarang pemilukada mestinya logistik sama kampanye. Satu sisi pilgub kami juga mengurus pencalonan perseorangan. Pilleg pada bulan yang sama kami mlakukan pendataan pemilu. Teman-teman bisa membayangkan dengan armada yang terbatas ini, kami harus melakukan tiga tanggung jawab. Sehingga beban kalau misalkan pemilu itu kebetulan berhimpitan seperti itu, kami memang merasakan luar biasa beban kerja itu...” (sumber: wawancara pada hari Senin 08/04/2013 pukul 13.00 WIB)

Memang jika melihat seperti hal itu dirasa perlu untuk menyeragamkan jadwal pemilu agar kinerja KPU lebih optimal. Khususnya dalam pemberian pendidikan politik pada masyarakat serta agar beban KPU berkurang sehingga

KPU bisa lebih fokus dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas.

Zainudin pun mengharapkan demikian. Seperti yang zainudin ungkapkan

“...agar pemilu itu berjalan tahapannya secara nasional bisa dirangkai dalam satu kesatuan, contoh pemilukada itu serentak seluruh Indonesia. Jadi misalkan tahun ini, ini tahunnya pemilukada. Entah pemilukada walikota, bupati atau gubernur. Maka tahun berikutnya itu misalkan urusan pilleg. Berikutnya pilpres. Kalau berjenjang begitu, masa kerja kita lima tahun itu full. Selama ini kalau masa berhimpitan kita satu, dua tahun tidak ada aktifitas. Tetapi begitu ada aktifitas, kita melakukan tiga hal. Lha ini yang menjadi beban berat kami. Tapi kalau regulasi secara nasional enak. Oke seluruh Indonesia di tahun pertama ini pemilukada di tingkat kabupaten kota. Tahun berikutnya pilihan gubernur serentak. Tahun berikutnya pilihan legislatif, tahun berikutnya pilihan presiden, sudah empat kali kan, empat tahap. Satu tahun terakhir tahap evaluasi, memberikan laporan dan apa-apa. Full sebenarnya..”
(sumber: wawancara pada hari Senin 08/04/2013 pukul 13.00 WIB)

KPU kota Malang sendiri merasa, infrastruktur yang dimilikinya tidak kurang, dalam artian KPU tidak mendapatkan kesulitan yang berarti dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Infrastruktur yang dimiliki KPU sangat penting untuk memaksimalkan bentuk-bentuk kegiatan, dalam hal ini pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat. Terkait masalah infrastruktur, ketua KPU juga mengungkapkan hal yang senada

“...Saya rasa infrastruktur KPU sudah cukup layak, cuma memang yang menjadi problem KPU adalah karena kita itu kegiatannya per-momentum maka baru ada anggaran waktu momen itu. Tapi kalau diluar pemilukada ya kita tidak punya anggaran. Akhirnya proses pendidikan politik itu tidak maksimal di bulan-bulan lain yang tidak ada momentum seperti pemilukada..” (sumber: wawancara pada hari senin 08/04/2013 pukul 09.30 WIB)

Meskipun tidak mendapati masalah yang berarti terkait dengan infrastruktur yang dimiliki KPU, namun seperti yang telah diketahui dari hasil wawancara diatas, KPU terhambat masalah peraturan dimana KPU baru mempunyai anggaran untuk pendidikan politik hanya pada saat momentum pemilukada. Diluar momentum pemilukada, KPU tidak bisa maksimal memberikan pendidikan politik karena kegiatannya dilaksanakan per-momentum. Hal ini perlu dipikirkan untuk kedepannya karena hal ini cukup menghambat proses pelaksanaan pendidikan politik pada masyarakat. Jika tidak segera diatasi maka cita-cita menuju pada demokrasi yang substansial semakin lama terwujud.

KPU Kota Malang yang terdiri dari lima komisioner dan kurang lebih dua puluh lima staf ini berusaha memutar otak agar dapat memaksimalkan pendidikan politik bagi masyarakat. Mengingat KPU tidak memiliki agen-agen khusus untuk memberikan pendidikan politik pada masyarakat, strategi yang digunakan KPU kota Malang dalam menghadapi Pemilukada kota Malang tahun 2013 yang pertama adalah dengan menjadikan masyarakat itu sendiri menjadi agen bagi KPU untuk memberikan pendidikan politik. Dalam artian, KPU menggandeng kurang lebih 24 unsur dalam masyarakat baik itu perguruan tinggi ,LSM dan lain sebagainya dan menyesuaikan bentuk kegiatan yang disukai masyarakat sesuai segment. Hal ini dilakukan mengingat masyarakat sangat beragam maka Sikap KPU lebih pada melayani sesuai dengan segmem masyarakat sehingga pesan dari KPU dapat tersalurkan efektif. Seperti apa yang diungkapkan Zainudin, ST

“...Kemudian kaitannya dengan semacam dibuatnya agen-agen, ini yang kami maksud agen-agen harapannya kami menggandeng kurang lebih 24 unsur, baik itu LSM, perguruan tinggi, ormas, komunitas, atau kelompok-kelompok tertentu...” (sumber: wawancara pada hari Senin 08/04/2013 pukul 13.00 WIB)

Lebih lanjut zainudin menjelaskan dalam menggandeng agen-agen itu maksudnya ialah adanya kerjasama dan penawaran, seperti yang beliau katakan

“...eh aku punya tema ini, anda punya komunitas, kami ada anggaran ini, silahkan anggaran ini dipakai, ini tema kami, kemudian ini pesan kami dan itupun kalau kami bisa menghadiri dan apa-apa kamipun bertindak sebagai narasumbernya, tapi kami memberikan keluwesan pada masyarakat, pada komunitas, itu untuk membuat sebuah gerakan sosialisasi dalam partisipasi politik itu dengan gaya mereka...” (sumber: wawancara pada hari Senin 08/04/2013 pukul 13.00 WIB)

Yang kedua, strategi KPU pada pemilukada 2013 dalam memberikan pendidikan politik masyarakat lebih mengedepankan komunikasi dua arah bersama masyarakat secara langsung. Seperti apa yang diungkapkan oleh ketua KPU, Hendri, ST.MT

“...setidak-tidaknya kalau kita mengadakan pertemuan, dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, dari diskusi di forum-forum itu kita bisa menangkap bahwa mereka tahu, oh pilkada itu seperti ini.jadi lebih efektif. Dan kita juga belum menemukan media-media lain sebetulnya yang dianggap lebih efektif daripada memberikan penjelasan-penjelasan langsung. Tapi kita juga melakukan pendidikan politik melalui media. Cuma kan media itu sifatnya satu arah. Tidak ada feedback. tidak ada diskursus didalamnya. Jadi kalau tatap muka, kalau mereka kurang tau kita dapat memberikan penjelasan langsung. Jadi, media itu yanh bermanfaat tapi efektifitasnya masi lebih efektif tatp muka...” (sumber: wawancara pada hari Senin/04/2013 pukul 09.30 WIB)

Karena memang kalau media itu disamping ruang gerak yang terbatas KPU juga dibatasi oleh waktu. Meskipun demikian KPU juga menggunakan sosialisasi dialog di radio, TV, yang mengutamakan adanya bentuk feedback dan pertanyaan-pertanyaan Hal ini juga diamini oleh pak zainudin, komisioner divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat,

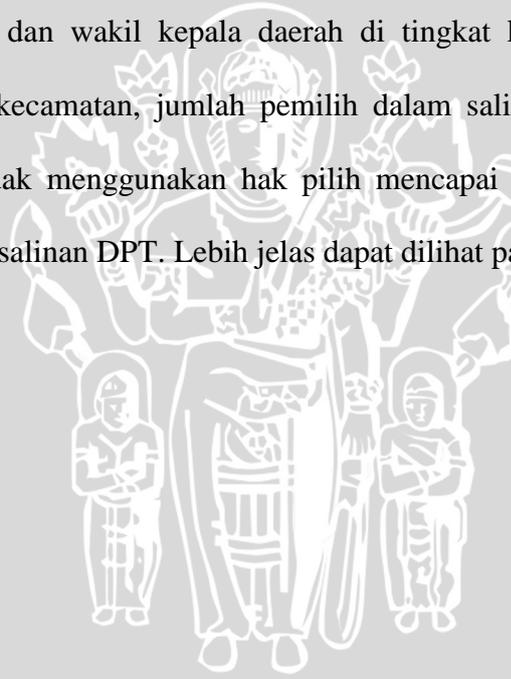
“...memang kami melakukan pendidikan politik khususnya pada masyarakat secara umum itu lebih banyak pada dialog. Bentuk-bentuk seminar, workshop dan yang lain-lain. Kemudian kami langsung berinteraksi dengan masyarakat juga misalkan, lewat seni budaya, kami Tanya misalkan masyarakat tau nggak pemilukada kapan? Itu bentuk-bentuk interaksi dengan masyarakat diselingi dengan berbagai hiburan yang menarik bagi mereka...”
(sumber: wawancara pada hari Senin 04/2013 pada pukul 13.00 WIB)

Yang ketiga, strategi KPU dalam memberikan pendidikan politik masyarakat yakni dengan mendekati diri pada masyarakat. Hal ini dirasa perlu dilakukan bagi KPU dengan harapan muncul rasa kepercayaan serta kedekatan emosional masyarakat dengan KPU. Mendekatkan diri bersama masyarakat diimplementasikan KPU dengan istilah *blusukan*. Model blusukan menjadi populer akhir-akhir ini dan cukup digemari masyarakat. Jelang pemungutan suara Pemilukada Kota Malang pada 23 Mei 2013, KPU Kota Malang tidak berhenti bersosialisasi. Tidak saja dengan menggunakan media pamlet dan spanduk, KPU blusukan ke pusat keramaian seperti mal dan pasar tradisional. Tidak ketinggalan, KPU juga blusukan ke Lembaga Permasyarakatan (LP) Lowokwaru. KPU memandang bahwa Penghuni LP kelas I Lowokwaru ini juga bagian dari warga masyarakat kota Malang. Mereka mempunyai hak yang sama dalam proses pemilukada. Oleh sebab itulah, KPU kota Malang menghimbau kepada penghuni

LP Lowokwaru yang mempunyai hak suara agar bisa memberikan suaranya dengan baik dan benar. Saat pencoblosan di LP Lowokwaru ini dibentuk Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga para penghuni LP bisa memberikan suaranya untuk memilih calon walikota sesuai dengan pilihannya masing-masing.

5.5 Hasil Pelaksanaan Strategi KPU Kota Malang dalam Memberikan Pendidikan Politik Masyarakat

Berdasarkan catatan pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kota diperoleh data bahwa dari lima (5) kecamatan, jumlah pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak menggunakan hak pilih mencapai 35 % dari 612.464 jumlah pemilih dalam salinan DPT. Lebih jelas dapat dilihat pada table 5.



Tabel 5. Prosentase dari data pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kota Malang

No	Uraian	Kec. Kedundung	Kec. Sukun	Kec. Klojen	Kec. Lowokwaru	Kec. Blimbing	Jml Akhir
1.	Jml pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap	137.903	139.946	81.852	120.089	132.674	612.464
2.	Jml pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih	89.560	94.635	50.724	76.134	85.508	396.561
3.	Jml pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	48.343	44.904	31.128	43.955	47.166	215.496
4.	Prosentase jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih	64,94%	67,62%	61,97%	63,4%	64,45%	64,82%
5.	Prosentase jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	35,06%	32,08%	38,03%	36,60%	35,55%	35,18%

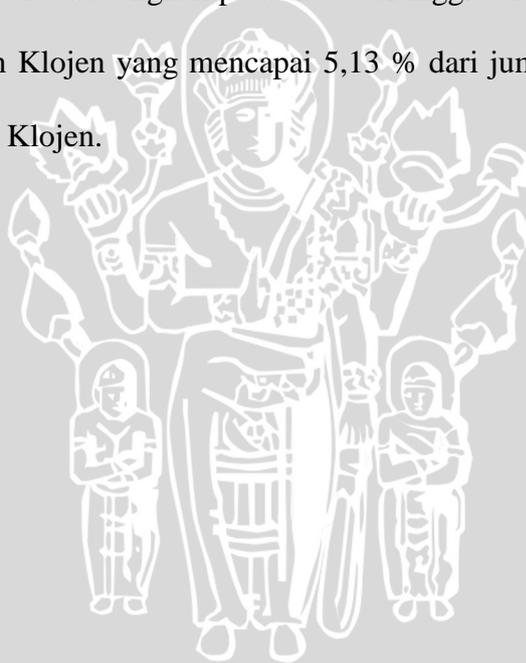
sumber: data rekapitulasi penghitungan suara KPU Kota Malang 2013 diolah

Jika dilihat dari masing-masing kecamatan, prosentase jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih paling tinggi adalah kecamatan Klojen yang mencapai 38,03 % dari 81.852 jumlah pemilih dalam salinan DPT di kecamatan Klojen.

Dari keseluruhan surat suara yang diterima (termasuk cadangan) oleh 5 kecamatan, 36,16 % surat suara tidak terpakai dan hampir 2 % surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. Dari 5 kecamatan surat suara yang tidak terpakai paling banyak di kecamatan Klojen mencapai

38.80 % dari surat suara yang diterima di kecamatan Klojen. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos paling banyak dikecamatan Kedungkandang yang mencapai 53 % dari total surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos di 5 kecamatan

Berdasarkan klasifikasi surat suara yang terpakai, surat suara yang tidak sah mencapai 4,86 % dari jumlah suara sah dan tidak sah di 5 kecamatan. Jumlah paling banyak surat suara yang tidak sah yaitu di kecamatan Kedungkandang yang mencapai 4400 surat suara. Sedangkan prosentase tertinggi surat suara yang tidak sah yaitu di kecamatan Klojen yang mencapai 5,13 % dari jumlah suara sah dan tidak sah di kecamatan Klojen.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari uraian pada pembahasan sebelumnya diketahui banyak hal yang membedah tentang strategi KPU dalam memberikan pendidikan politik masyarakat. Skripsi dengan judul “Pendidikan Politik dan Demokrasi Lokal (Studi Strategi KPU Kota Malang pada Pemilu 2013)” ini membahas bagaimana strategi institusi KPU tersebut memberikan pendidikan politik dalam demokratisasi lokal di kota Malang yang diketahui melalui program kegiatan dan prinsip yang dipakai dalam menjalankan laju gerak institusi KPU di Kota Malang. Berikut adalah kesimpulan dari penelitian ini :

1. Strategi KPU dalam meningkatkan pendidikan politik masyarakat yakni dengan mengedepankan bentuk komunikasi dua arah, menggandeng agen-agen, dan lebih dekat dengan masyarakat
2. KPU belum melaksanakan pendidikan politik dalam arti yang sebenarnya secara utuh, dimana KPU hanya berorientasi pada banyaknya jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya
3. Strategi pendewasaan dan pematangan politik masyarakat yang telah dilakukan oleh KPU belum optimal. Hal ini dipertegas dengan hasil lapangan yang menunjukkan angka golput yang cukup tinggi, yakni mencapai angka 35 %

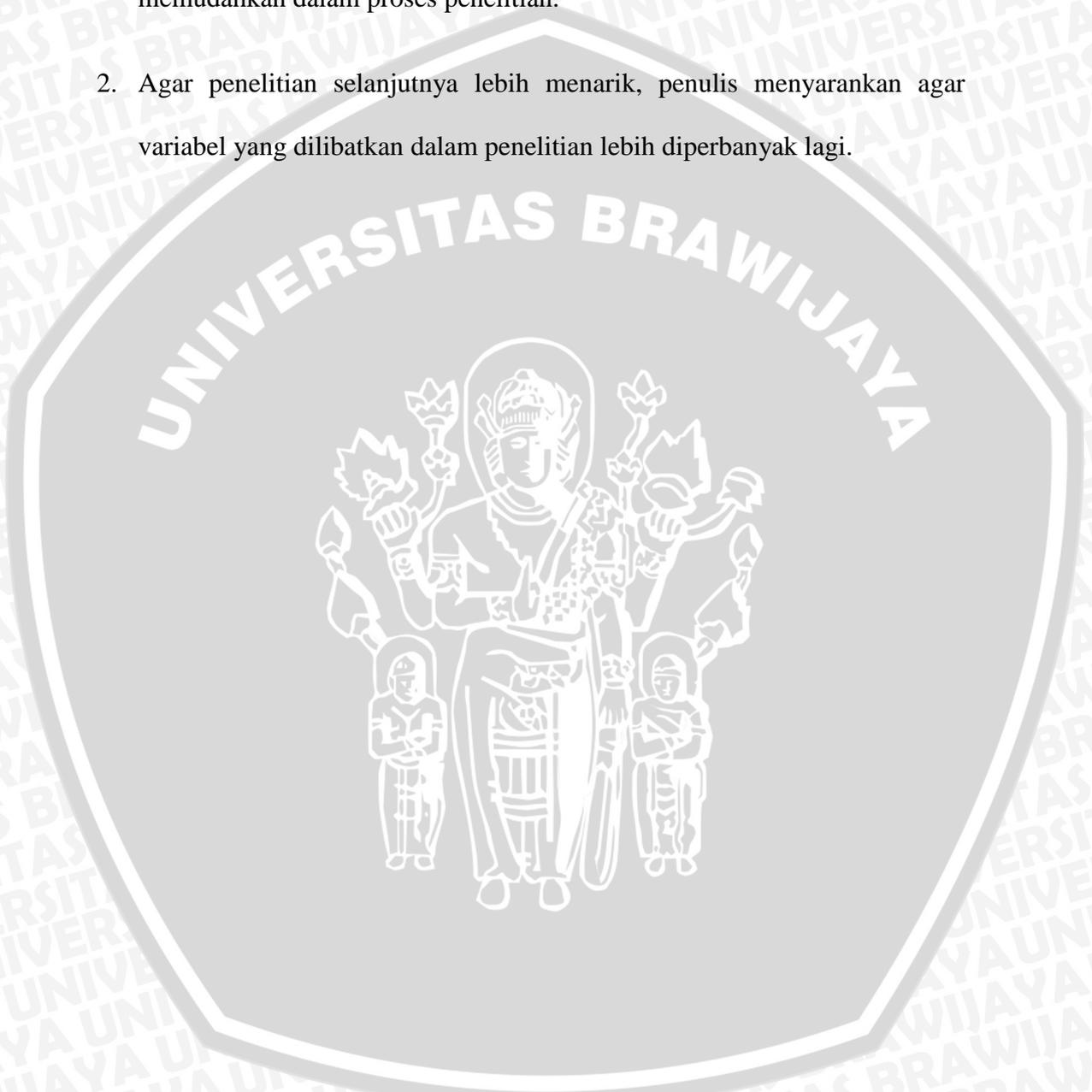
6.2 Saran

Terselesainya penulisan ini, penulis merekomendasikan dan memberikan saran atas apa yang menjadi fokus penelitian skripsi ini. Dengan adanya bagian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan sedikit saran kepada KPU Kota Malang agar dapat sedikit membangun dan dapat menjadi bahan pertimbangan KPU Kota Malang agar menjadi lebih berkualitas dan baik kedepannya. Adapun saran penulis sebagai berikut:

1. KPU Kota Malang perlu berperan lebih besar khususnya dalam melaksanakan pendidikan politik pada masyarakat secara utuh agar tercipta rasa tanggung jawab politik lebih besar pada masyarakat, sebagai bentuk moral politik yang membuat wawasan dan sikap politik bangsa lebih sehat
2. Pemetaan dan strategi dalam memberikan pendidikan politik masyarakat oleh KPU Kota Malang perlu lebih dimantapkan lagi untuk menyongsong Pemilu 2014.
3. Administrasi KPU Kota Malang perlu dibenahi agar mempermudah mengakses data yang dibutuhkan untuk penelitian

Sedangkan untuk peneliti selanjutnya, penulis juga memberikan sedikit saran agar kedepannya dapat menghasilkan penelitian yang lebih berkualitas. Adapun saran penulis sebagai berikut:

1. Fokus penelitian lebih dipersempit lagi, karena dengan mempersempit fokus penelitian, maka akan dapat mempertajam ulasan penelitian dan memudahkan dalam proses penelitian.
2. Agar penelitian selanjutnya lebih menarik, penulis menyarankan agar variabel yang dilibatkan dalam penelitian lebih diperbanyak lagi.



DAFTAR PUSTAKA

Agenda Pilkada Langsung Dan Kesiapan Masyarakat Daerah. Boyolali: LSP3RA. 2004.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. 2009.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cet. 10, tahun 1999.

Harrison, Lisa. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda. 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA. 2011.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 1999.

Tricahyo, Ibnu. *Reformasi Pemilu: Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*. Malang: In-TRANS Publishing. 2009.

Yin, Robert K, *Studi Kasus; Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.

Internet

<http://kpud-malangkota.go.id/>

<http://www.malang.go.id>

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Resmi

Undang-Undang Dasar 1945

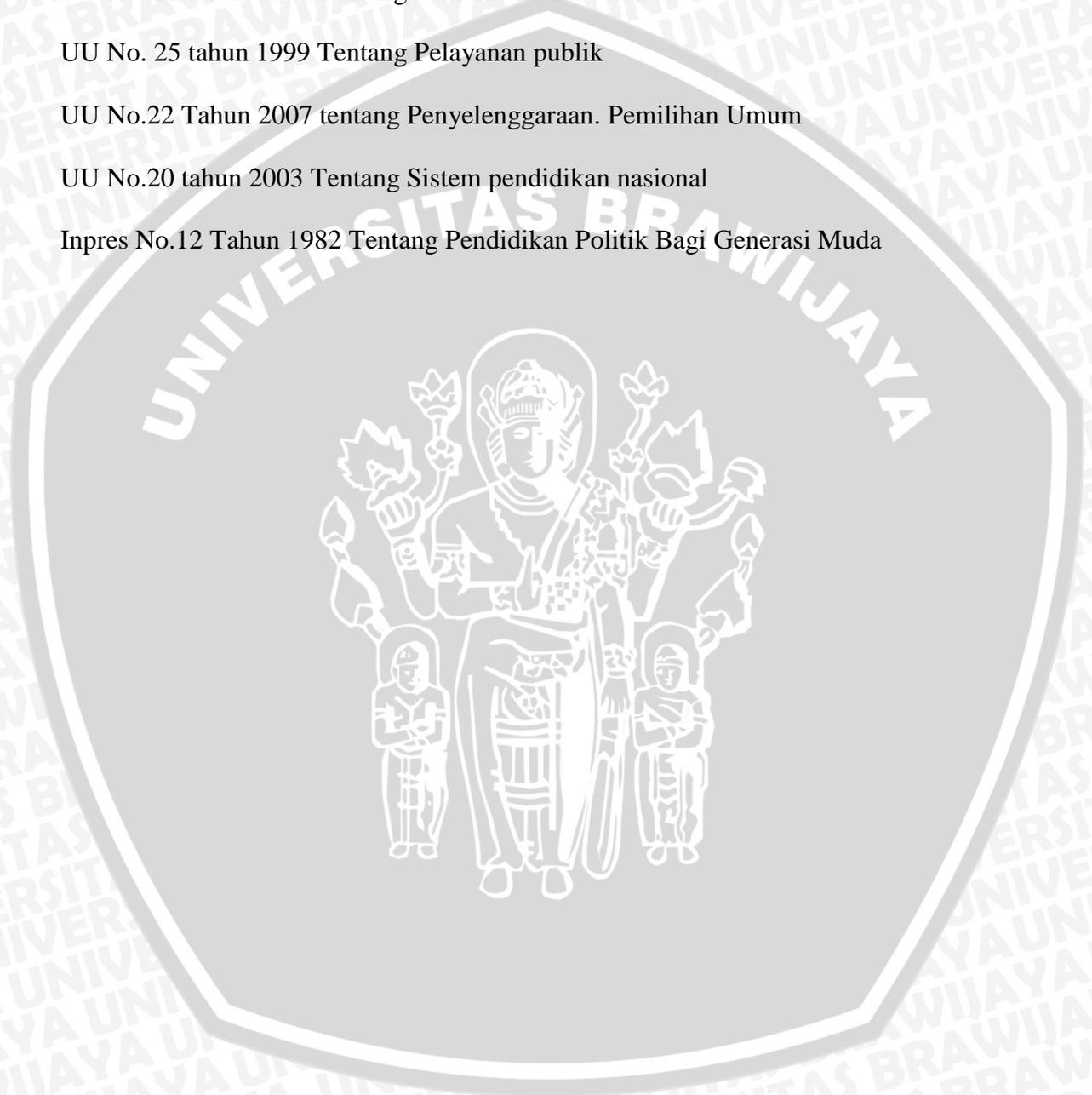
UU No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 25 tahun 1999 Tentang Pelayanan publik

UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan. Pemilihan Umum

UU No.20 tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan nasional

Inpres No.12 Tahun 1982 Tentang Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda



*Lampiran 1***HASIL WAWANCARA TERSTRUKTUR**

I. Nama : Hendri. ST. MT.
Jabatan : Ketua KPU kota Malang
Hari, Tanggal : Senin, 8 April 2013
Waktu : 09.30 WIB

1. Menurut Bapak, pendidikan politik itu seperti apa?

Sebelum kita membahas pendidikan politik, maka kita harus mengetahui secara umum definisi politik itu sendiri. Seperti yang diketahui, politik itu banyak sekali definisinya. Tapi salah satu yang terpenting adalah pengelolaan kekuasaan politik dalam hal ini yang melibatkan partisipasi masyarakat. Ini bisa dilihat seperti di buku Miriam Budiarjo, definisi-definisi politik itu banyak. Tetapi intinya adalah bahwa bagaimana pengelolaan kehidupan bersama itu entah itu di kota, propinsi, kabupaten, atau negara, disana ada proses-proses pengambilan keputusan, dari situ kemudian ada sistemnya, ada sistem demokrasi, pemilu dan seterusnya. Artinya yang kita sebut dengan pendidikan politik itu bagaimana masyarakat memahami pemilu itu untuk apa sih sebenarnya. Mengapa kita harus memilih orang, memilih walikota, kenapa tidak ditetapkan saja dari pusat misalnya. Nah, masyarakat harus tau ternyata sistem kita ini demokrasi. Sistem demokrasi itu memberikan kekuasaan atau kedaulatan bagi setiap warga untuk turut menentukan kehidupan bersama dengan memilih pemimpin caranya adalah

pemilu 5 tahun sekali. Kalau dia memilih walikota disebut pemilukada dan seterusnya, sehingga ketika mereka menggunakan hak pilihnya, mereka sadar bahwa ini adalah bagian dari hak mereka untuk turut menentukan kehidupan bersama. Jadi bagi KPU, pendidikan politik itu adalah memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat sehingga mereka memilih dengan rasional dengan sadar bukan dengan tidak tahu apa-apa, seperti ikut-ikutan. Atau hanya dengan diberi uang 20.000 nyoblos. Nah, ini berarti kan mereka tidak punya cukup wawasan. Padahal sebenarnya apa yang mereka pilih itu menentukan bagi dia dan masyarakat lainnya sehingga dia tidak gampang-gampang saja memilihnya. Tidak gampang-gampang saja memutuskan keputusan politik mereka itu hanya dengan hal-hal yang kecil. Intinya bagi KPU pendidikan politik itu memberikan pemahaman wawasan dan membangun kesadaran masyarakat agar terlibat salah satunya dalam pemilukada itu.

2. Bagaimana cara KPU dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat?

Ya, karena KPU suatu lembaga yang tentu setiap kegiatannya itu perlu dipertanggungjawabkan, maka harus ada anggarannya, jadi tidak bisa asal-asalan. Kita menyediakan anggaran untuk sebuah kegiatan. Nah, di dalam pemilukada disebut kegiatan sosialisasi. Nah KPU dalam konteks pilkada ini di samping kita melakukan sendiri, sosialisasi ke masyarakat apa itu pemilu apa itu pilkada apa itu hak warga negara dan seterusnya, dan bagaimana proses calon-

calon itu bisa jadi, jadi calon itu bukanujuk-juk jadi calon, jadi kita melakukan tatap muka kepada masyarakat di kelurahan-kelurahan. Kemudian kita juga mengajak kerja sama LSM, Ormas. itu memberikan pemahaman-pemahaman politik atau kususnyapilkada, kemudian kita juga mengajak sekolah-sekolah, organisasi mahasiswa, macam-macam. Jadi untuk sebesar-besarnya memberikan penjelasan setidaknya kelompok-kelompok strategis dalam masyarakat itu tau.

3. Apa kelebihan dari cara-cara ini?

Artinya begini, bahwa saya tidak bicara kuantitatif ya, saya juga tidak mengukur tetapi bahwa setidaknya kalau kita mengadakan pertemuan, dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, dari diskusi di forum-forum itu kita bisa menangkap bahwa mereka tahu, oh pilkada itu seperti ini, jadi lebih efektif. Dan kita juga belum menemukan media-media lain sebetulnya yang dianggap lebih efektif daripada memberikan penjelasan-penjelasan langsung. Tapi kita juga melakukan pendidikan politik melalui media. Cuma kan media itu sifatnya satu arah. Tidak ada feedback. Tidak ada diskursus di dalamnya. Jadi kalau tatap muka kalau mereka kurang tau kita dapat memberikan penjelasan langsung. Jadi, media itu yah bermanfaat tapi efektifitasnya masi lebih efektif tatap muka. Karena kalau media itu disamping ruang gerak kita terbatas kita juga dibatasi oleh waktu. Tetapi kita juga menggunakan sosialisasi dialog di radio, TV, jadi ada feedback dan pertanyaan-pertanyaan.

4. Siapa yang melakukan pendidikan politik?

Di dalam KPU kita dibagi menjadi divisi-divisi, ada logistik, keuangan, dan sebagainya. Kita juga ada divisi sosialisasi dan hubungan masyarakat itu Pak Zainudin koordinatornya, orangnya sedang berada di Jakarta sekarang. Jadi dia yang mendesain berbagai sosialisasi.

5. Berarti ada pelatihan-pelatihan khusus untuk agen-agen yang memberikan pendidikan politik di masyarakat ya Pak?

Karena anggaran kita terbatas, jadi untuk pendidikan politiknya langsung dikoordinasikan kita. Beda dengan misalnya pelatihan terbuka, kita memang di setiap kecamatan ada PPK, di kelurahan ada PPS, ada pelatihan terbuka untuk memahami tugas-tugas mereka. Tapi kalau untuk *Training for Trainer* kita tidak ada. Namun, kalau untuk petugas kita ada. Kita melatih dulu kecamatan, nanti kecamatan melatih kelurahan.

6. Bentuk pelatihannya sendiri seperti apa, Pak?

Kita memandunya dari sini dengan mengacu pada pedoman sosialisasi. Petugas seperti PPK kita beri pembekalan dengan beberapa pedoman sosialisasi.

7. Sejak kapan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat ini dilakukan, Pak?

Sudah lama, sejak bulan Februari lalu kita sudah melakukan sosialisasi untuk pemilukada.

8. Lalu, apakah infrastruktur KPU sudah cukup layak untuk memberikan pendidikan politik?

Saya rasa sudah cukup, cuma memang yang menjadi problem KPU adalah karena kita itu kegiatannya per-momentum maka baru ada anggaran waktu momen itu. Tapi kalau di luar pilkada ya kita tidak punya anggaran. Akhirnya proses pendidikan politik itu tidak maksimal di bulan-bulan lain yang tidak ada momentum seperti pilkada.

9. Kalau untuk Persiapan KPU sendiri sudah sejauh mana, Pak?

Ya sejauh yang kita evaluasi, kita sudah siapkan petugasnya, logistiknya sudah disiapkan, calon pemilihnya sudah didata, calon-calonnya sudah ada, sejauh ini kita sudah siap. Jadi dari waktu yang sudah ditentukan kita sudah siap tidak ada masalah.

10. Adakah dan seperti apakah ancaman atau tantangan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat?

Saya kira sejauh ini sebetulnya persoalan tantangan itu tidak ada. Tidak ada yang menentang pendidikan tentang demokrasi yang kita berikan selama ini. jadi sebetulnya tantangan-tantangan yang prinsip tidak ada. Ya kecuali ada beberapa hambatan, misalnya kita menemukan tidak banyak orang yang memahami secara dalam sebenarnya proses-proses politik itu, jadi mereka itu kadang-kadang taunya ada pilkada ya nyoblos begitu saja, tapi mereka kebanyakan tidak mengetahui alasan mengapa kita harus nyoblos? Mengapa ada pemilu? Mengapa

kita tidak menggunakan sistem lain? Nah itu tidak banyak yang paham. Sehingga sosialisasi itu menjadi sesuatu yang sangat teknis menurut saya. Padahal sebetulnya masyarakat umum itu harus tau dasar-dasar atau bila perlu dasar-dasar filosofis mengapa harus ada pilkada. Kalau saya, pengalaman hampir 10 tahun di KPU ini saya tuangkan dalam suatu bentuk buku. Saya coba urutkan, mengapa pada akhirnya timbul pemilu itu. Dari pandangan-pandangan teoritis, mengapa kita perlu negara, mengapa kita perlu pemimpin dan lain sebagainya. Setidaknya itu akan menghantarkan orang-orang sehingga mereka paham tentang pemilu itu seperti ini. Pemilu ini bukan proyek asal-asalan, maksudnya pemilu bukan suatu proyek yang dilaksanakan tanpa dasar-dasar yang jelas. Nah, itu yang saya ingin jelaskan dalam buku yang saya tulis, setidaknya itu bisa jadi semacam referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

11. Apakah anggaran untuk pendidikan politik sudah cukup bagi KPU?

Saya kira untuk ukuran pilkada sudah cukup. Setidaknya kita tidak menghadapi hambatan yang besar

12. Harapan Bapak untuk pemilukada kedepan?

Karena saya kira demokrasi yang dikemas secara teknis yang disebut pemilu itu makin ke depan pemahaman masyarakat makin dalam lah. Walaupun mereka tidak terlalu serius memahami politik tapi mereka tau lah. Sehingga nanti ketika mereka menunaikan hak-hanya itu adalah pilihan sadar. Bukan pilihan-pilihan

asal. Kemudian mereka tidak gampang memberikan kekuasaan yang awalnya di tangan mereka sendiri kepada orang tertentu atau partai tertentu.

13. Apakah tidak ada perubahan metode terkait pemberian pendidikan politik kepada masyarakat?

Kita sebenarnya terbuka pada metode-metode baru. Tetapi setau saya setiap lembaga-lembaga dan di banyak tempat pemilu ya paling improvisasinya hanya menggunakan media ini misalnya jaran kepang, tidak ada media-media yang baru betul. Jadi ya hanya begitu. Dan kalau kita ngomong media sosial kita belum menggarap secara serius karena warga kita masih belum terlalu akrab dengan media-media sosial. Jadi kita sekarang ini lebih langsung ke lapangan lah. Untuk sementara menggandeng pihak-pihak yang memiliki basis-basis masyarakat katakanlah ormas.

14. Bagaimana tingkat kesadaran politik masyarakat menurut Bapak?

Kalau kita lihat dari sikap partisipasinya lumayan di angka 70%. Jadi ya masih harus di maksimalisasi menjadi 90% sampai 100%. Jadi angka 70% untuk kota menengah menurut saya sudah bagus angkanya. Kalau kita melihat kesadaran dalam arti matematis ya partisipasi itu artinya dia hadir menggunakan hak pilih. Yang menjadi masalah kan yang tidak hadirnya. Apakah dia punya acara atau aktifitas lain.

II. Nama : Zainudin, ST
Jabatan : Divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat KPU kota
Malang
Hari, Tanggal : Senin, 8 April 2013
Waktu : 13.00 WIB

1. Seperti apa jobdes Bapak?

Pembagian tugas di divisi organisasi, sosialisasi, dan hubungan masyarakat termasuk SDM itu saya yang menangani. Ya tugas-tugas pokok yang kami emban kaitannya dengan partisipasi masyarakat bagaimana dalam suatu proses pemilu baik di, pilgub, pilpres, baik pemilukada kota malang, yaitu kami membangkitkan semangat *stakeholder* yang ada. Masyarakat, ayo bersama-sama mensukseskan pemilukada ini sesuai dengan kemampuan masing-masing *stakeholder* itu. Karena pendidikan politik masyarakat itu bukan tanggung jawab KPU semata. Tetapi ini juga bagian dari *stakeholder*. Misalkan partai politik. Mereka punya kewajiban untuk membangun pendidikan politik pada konstituen, itu diatur dalam konstitusi. Perguruan tinggi dan apa-apa punya kewajiban untuk memberikan sebuah pelajaran tentang bagaimana sih politik misalkan yang jujur, adil, santun, dan yang benar. Termasuk ormas yang punya masa, mereka setidaknya tidaknya memberikan pendidikan politik kepada konstituennya atau pada masanya. Misalkan kaitannya dengan pemilukada. Eh, ayo memilih dengan jujur, Eh, ayo hindari money politik. Nah, *stakeholder* ini bersama KPU juga ini punya

kewajiban untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Tujuannya adalah, kalau itu ada timbal balik, masyarakat itu kemudian ada interaksi, ada tanggapan dan apapun, maka inilah yang dikatakan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu. Mereka misalkan memprotes, mereka mempertanyakan terkait dengan pelaksanaan pemilu dan apa-apa, ini juga bagian dari partisipasi masyarakat. Banyak sekali bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pemilu. Contoh, mereka melakukan debat publik, mereka misalkan mensosialisasikan sistem pemilu, tolak golput, tolak *money* politik, dan apa-apa, Loh, itu silahkan masyarakat. Karena KPU mempunyai keterbatasan, ya mungkin ruang, waktu, energi, tenaga, dan yang lain-lain. Maka kalau tidak didukung oleh masyarakat, proses pemilu secara umum itu tidak bisa berjalan secara optimal. Itu konteks partisipasi masyarakat kaitannya dengan divisi yang saya tangani tadi.

2. Bagaimana cara KPU dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat?

Banyak cara. Yang pertama, kami mensosialisasikan kepada masyarakat banyak hal. Yang pertama mengenai teknis dan cara pemilu. Itu kami lakukan. Misalkan bagaimana tata cara mencoblos, bagaimana sistem pencalonan, bagaimana itu kampanye.

3. Ada tidak Pak, pelatihan agen-agen yang bertugas memberikan pendidikan politik?

Prinsip kita, kita tidak melakukan model pelatihan semacam bridge, dan apa-apa. Memang kami secara umum itu kami melakukan pendidikan politik khususnya pada masyarakat secara umum itu lebih banyak pada dialog. Bentuk-bentuk seminar, workshop, dan yang lain-lain. Kemudian kami langsung berinteraksi dengan masyarakat juga, misalkan lewat seni-seni budaya, kami tanya misalkan masyarakat tau nggak pemilukada kapan? Itu bentuk-bentuk interaksi dengan masyarakat diselingi dengan berbagai hiburan yang menarik bagi mereka. Kemudian kaitannya dengan semacam dibuatnya agen-agen, ini yang kami maksud agen-agen harapannya kami menggandeng kurang lebih ada 24 unsur, baik itu LSM, perguruan tinggi, ormas, komunitas, atau kelompok-kelompok tertentu. Mereka itulah yang sebenarnya kita jadikan agen. Eh, aku punya tema ini, Anda punya komunitas, kami ada anggaran ini, silahkan anggaran ini dipakai, ini tema kami, kemudian ini pesan kami dan itupun kami kalau misalkan bisa menghadiri dan apa-apa kamipun bertindak sebagai narasumbernya, tapi kami memberikan keluwesan pada masyarakat, pada komunitas-komunitas itu untuk membuat sebuah gerakan sosialisasi dalam partisipasi politik itu dengan gaya mereka. Kalau mereka misalkan ormas islam, oh enaknya untuk menyampaikan lewat istigozah atau pengajian ya monggo, tapi pesan ini nanti tolong disampaikan. Sehingga harapan kami ini tepat sasaran. Karena mengumpulkan orang-orang itu sulit. Bagaimana anak muda dan apa-apa malam taun baru kita di

depan balai kota, itu kita yang mengadakan acara. Itu segmen kita adalah pendidikan masyarakat muda. Jadi puluhan ribu lebih anak-anak muda datang, ini kami sampaikan. Hey, tahun ini ada pemilu, tanggal sekian. Pilih yang jujur, bla bla bla. Termasuk kita juga di 14 sekolah SMA kami sosialisasi ke mereka dan itu sudah kami lakukan. Jadi mulai awal tahapan, mulai bulan Oktober kami sudah melakukan sosialisasi. Sosialisasi itu selama tahapan itu tadi. Cuma metode dan modelnya yang berbeda-beda. Kami mengiklankan, itu sosialisasi kan. Cuma di tiap bulan itu yang berbeda tema yang kita usung itu berbeda. Kalau misalkan waktunya pencalonan, ya kami sosialisasi tentang bagaimana caranya sistem pencalonan itu, siapa yang hendak mencalonkan. Ketika masuk pemilih yang kami sosialisasikan tentang pemilih. Kalau sekarang bagaimana sih cara pencoblosan. Jadi sosialisasi itu ya selama tahapan itu. Sebelum coblosan ini kita lakukan sosialisasi.

4. Apakah infrastruktur KPU sudah cukup layak untuk memberikan pendidikan politik?

Saya kira, dengan perangkat yang sudah ada kami berprinsip mengoptimalkan yang sudah ada. karena kalau harus menambah dan tetek bengek itu kaitannya harus mengubah undang-undang. Itulah pertama kami punya perangkat itu sampai di tingkat kelurahan. Disitu ada tiga orang PPS. Di tingkat kecamatan kami punya 5 orang anggota PPK. Nah, perangkat kami di bawah inilah yang mensosialisasikan. Mereka yang menjadi tim pelaksana disitu. Ketika kami

sosialisasi di tingkat kelurahan maka tenaga kami PPS ini mereka yang harus menyiapkan segala sesuatunya, siapa yang harus diundang da apa-apa, kami sebagai pembuat regulasi kami datang menyampaikan informasi. Artinya kami tidak mengatakan kurang apa tidak, tetapi perangkat yang sudah ada kami optimalkan seoptimal mungkin.

5. Adakah dan seperti apakah hambatan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat?

Yang pertama bahwa masyarakat terutama di kota malang itu ada indikasi titik jenuh ketika pemilu itu dilakukan secara berduyun-duyun. Sekarang itu ada tiga tahapan pemilu, ada pemilu legislatif, ada pemilu gubernur, dan ada pemilu walikota ini. dan untuk kota malang ini, memang saya katakan masyarakat menengah ke atas, sehingga kami mencari format bagaimana pesan-pesan kami sesuai dengan objek yang kami sasar. Nah, mangkannya kami lakukan. Kalau hanya sekedar seminar-seminar saja, berarti kan hanya kalangan-kalangan tertentu yang mereka bisa menghadiri. Maka kami lakukan ada seni budaya dan olahraga. Termasuk kamarin, kita bersama Radar Malang jalan sehat. Nah ini harapanya masyarakat banyak yang dating. Pada saat itulah materi itu kita sampaikan. Dengan anak muda, pada malam taun baru juga seperti itu. Kita nangep grup band lebih dari 15 grup. Nah, pesan kita sampaikan. Pendidikan pemula juga kita lakukan di sekolah-sekolah, kita kerja sama dengan pihak sekolah. Kemudian kepada ormas, kami lakukan. Kepada LSM, kami lakukan.

kepada kelompok divable. Kemarin terakhir dengan persatuan Tunanetra juga kita lakukan. Komunitas-komunitas tertentu, misalkan di lingkungan penjara, kita lakukan. Nah, inilah berbagai macam cara-cara kami.

6. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak jika KPU juga harus memberikan pendidikan politik, jadi tidak hanya teknis?

Ketika regulasi itu kami buat, kami siap saja. Tetapi yang perlu diingat bahwa penyelenggaraan pemilu kaitanya teknis dan apa-apa itu sendiri juga sudah luar biasa. Itu tingkat beban sosial saja belum lagi kalau waktu bersamaan begini. Bisa dibayangkan dalam satu waktu kami mengerjakan tiga tahapan yang berbeda. Sekarang pemilukada mestiya logistik sama kampanye. Satu sisi pilgub kami juga mengurus pencalonan perseorangan. Pilleg pada bulan yang sama kami melakukan pendataan pemilu. Teman-teman bisa membayangkan dengan armada yang terbatas ini, kami harus melakukan tiga tanggung jawab. Sehingga beban kalau misalkan pemilu itu kebetulan berhimpitan seperti itu, kami memang merasakan luar biasa beban kerja itu.

7. Apakah perlu menambah personal dalam memberikan pendidikan politik?

Kalau menambah personal dan apa-apa selama pemilu itu berjalan tahapannya secara nasional itu bias dirangkai dalam satu kesatuan, contoh pemilukada itu serentak seluruh Indonesia. Jadi misalkan tahun ini, ini tahunnya pemilukada. Entah pemilukada walikota, bupati atau gubernur. Maka tahun berikutnya itu

misalkan urusan pilleg. Berikutnya pilpres. Kalau berjenjang begitu, masa kerja kita lima tahun itu full. Selama ini kalau masa berhimpitan kita satu dua tahun tidak ada aktifitas. Tapi begitu ada aktivitas, kita melakukan tiga hal. Lah ini yang menjadi beban berat kami. Tapi kalau regulasi secara nasional enak, oke seluruh indonesia di tahun pertama ini pemilukada di tingkat kabupaten kota atau bupati. Tahun berikutnya pilihan gubernur serentak. Tahun berikutnya pilihan legislatif, tahun berikutnya pilihan presiden, sudah empat kali kan, empat tahap. Satu tahun terakhir tahap evaluasi, memberikan laporan dan apa-apa. Full sebenarnya. Dengan armada kami yang disini ada 5 komisioner, kami dibantu kurang lebih 25 staf.

III. Nama : Alim Mustofa
Jabatan : Divisi Perencanaan dan Data KPU kota Malang
Hari, Tanggal : Rabu, 10 April 2013
Waktu : 09.30 WIB

1. Apa jobdes Bapak?

Kalau perencanaan dan data itu merencanakan semua kegiatan yang harus dilakukan oleh KPU dalam rangka persiapan pemilu. Menyusun tahapan, menyiapkan draft, termasuk rencana kerja. Setelah itu diplenokan. Tentang data, saya membidangi pemutakhiran data pemilih. Menyiapkan data pemilih untuk semua pemilu.

2. Perencanaan tentang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dimulai sejak kapan?

Programnya secara makro kita siapkan. Jadi kita menerima usulan dari masing-masing divisi. Kaya Pak Zainudin divisi organisasi dan SDM, termasuk pendidikan masyarakat dia, dia ngusulkan ke kita, nanti kita printkan bersama. Dan kita lakukan mulai di pemilih pemula di SMA-SMA, kepada masyarakat melalui media-media, ada yang kita terjun langsung dengan cara kita memberikan kaya semacam sosialisasi tatap muka, ada yang melalui radio, TV, bisa.

3. Siapa yang melakukan pendidikan politik dari KPU?

Semua yang ada disini. Dalam rangka melaksanakan kegiatan itu KPU bisa bekerja sama dengan lembaga lain.

4. Ada pelatihan tidak untuk agen2 yang memberikan pendidikan politik

Biasanya mereka punya perencanaan sendiri. Dia ada proposal. Dia punya konsep ini misalkan. Nanti dia mengajukan ke kita, kita koreksi, dan jika sesuai dengan kita kita setuju, jalan. Proposal dari masyarakat itu diajukan ke KPU kota malang, nanti akan kita cek bersama-sama. Bisa juga kita yang punya program, misalkan program ini, targetnya ini, kemudian keluarannya ini, katakanlah kita nunjuk salah satu lembaga dari luar KPU , bisa itu juga.

5. Menurut Bapak, tantangan KPU dalam memberikan pendidikan politik itu apa saja?

Tantangannya itu banyak. Salah satunya masyarakat memandang bahwa ketika ngomong politik pasti ngomong uang. Dan mereka kadang-kadang tidak bersemangat kalau tidak ada uang. Malah KPU yang sedang woro-woro terkait memberikan pendidikan politik dikira partai. Mana kaosnya? Mana uangnya? Nggak ada. jadi parahnya seperti itu sekarang ini. karena sudah sangat transaksional masyarakatnya.

6. Bagaimana cara menghadapi hal seperti itu?

Ya kita berusaha semaksimal mungkin memberikan pengertian, ini adalah lembaga KPU sebagai penyelenggara pemilu. Kita menghimbau pada masyarakat bahwa untuk menggunakan hak pilih tidak usah menunggu yang atau jangan sampai hak pilih itu ditukar dengan sesuatu. Itu yang selalu kita omongkan.

7. Apakah anggarannya sudah cukup tidak Pak untuk memberikan pendidikan politik secara layak?

Kita hari ini agak teknis pekerjaannya. Karena anggarannya tersupport untuk itu. Tapi kaya kemarin kita dalam rangka penyadaran kepada masyarakat menggunakan hak pilihnya. Meskipun saya bukan divisi sosialisasi, saya keliling ke setiap kecamatan 2 hari untuk memberikan woro-woro kepada pemilih agar sadar akan hak pilihnya itu jika belum tercatat segera menghubungi petugas. 2

hari kita keliling ke setiap kecamatan, jadi di kota malang ada 5 kecamatan. 10 hari kita keliling ke pelosok-pelosok gitu. Ke setiap sudut yang ada di kecamatan itu. Agar masyarakat ingat bahwa saya sudah terdata, minimal itu dulu. Itulah salah satu unsur pendidikan politik. Minimal mereka itu ingat hak politiknya. Memilih kan hak politik. Itu dulu. Itupun tantangannya seperti yang saya katakan tadi. Mereka tanya kaos, uangnya mana. Karena mereka ingat pemilu itu pasti ingat duit, bukan ingat yang lain. Ini tantangan kita yang paling berat. yang salah darimana? Ya kita cari sama-sama.

8. Untuk harapan Bapak sendiri ke depan terkait tentang peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat yang bisa diusahakan oleh KPU seperti apa?

Kalau saya lebih banyak menyoroti tentang peningkatan fungsi peran KPU dalam rangka untuk pendidikan politik. Meskipun tidak sampai keluar dari tugas utama sebagai penyelenggara teknis pemilu, tapi sebenarnya KPU itu lembaga strategis untuk memberikan pendidikan politik karena KPU adalah sebagai lembaga independen dan netral. Dengan begitu akan memberikan pemahaman-pemahaman politik secara benar. Jadi tidak seperti dulu. Bahwa jaman dulu memilih itu merupakan suatu kewajiban politik bukan hak politik. Sekarang itu hak politik kesadaran murni. Mangkanya tantangannya lebih berat sekarang KPU itu. Bagaimana menarik orang dating ke TPS itu tanpa dikasi apa-apa itu penting.

Jadi kan nilai-nilai sudah banyak yang dihancurkan oleh perubahan-perubahan orang. Ke TPS pun sekarang kadang-kadang sudah malas.

9. Adakah metode2 baru dalam mensosialisasikan pendidikan politik?

Sebenarnya banyak, cuma kalau diback up anggaran, he.he.. Saya itu pernah bukan atas nama KPU tapi atas nama LSM saya memberikan pendidikan pemilih selama 3 hari nginap. Saya mengundang sekitar 100 orang dari perwakilan-perwakilan sekolah. Kemudian saya buat simulasi pemilu. Simulasi pemilu dari hulu sampai hilir. Membuat visi misi, berdebat seolah-olah mereka kepala daerah. Siswa-siswa itu saya tempatkan seolah-olah sebagai praktisi politik. Saya bentuk berbagai macam kelompok, kemudian mereka harus membuat visi misi, kemudian mereka menjual visi misi kepada kelompok lain agar tertarik bergabung menjadi koalisi, kemudian memunculkan pasangan calon, kemudian pasangan calon itu diadu oleh kelompok-kelompok lain, ada kampanyenya, macem-macem. Cuma perlu biaya banyak. Tapi mereka untuk internalisasi nilai sangat tepat. Saya bawa untuk praktek langsung seolah-olah mereka itu ya menjadi pelaku langsung pada politik itu. Mereka harus mempertahankan argumentasinya untuk mempertahankan ini, kemudian berkampanye, itu kalau kita mau serius.

Lampiran 2

Foto-foto Saat Wawancara Dengan Narasumber

Bersama Bpk. Hendry ST.MT. (Ketua KPU Kota Malang)



Bersama Bpk. Zainudin,ST (Divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat)



Lampiran 3

Tabel 3. Tahapan Pemilukada Kota Malang tahun 2013

No	PROGRAM/ KEGIATAN	JADWAL	
		MULAI	BERAKHIR
I	PERSIAPAN	24 Okt 2012	17 Nov 2012
II	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
a.	Penerimaan DP4 dari Pemerintah Kota Malang	23 Des 2012	
b.	Penyusunan Daftar Pemilih Berdasarkan DP4	24 Des 2012	23 Jan 2013
c.	Pemuthakiran Data Pemilih dan Penyusun DPS	23 Jan 2013	22 Feb 2013
d.	Pengumuman DPS	23 Feb 2013	15 Mar 2013
e.	Perbaikan DPS	23 Feb 2013	15 Mar 2013
f.	Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan	16 Mar 2013	18 Mar 2013
g.	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	18 Mar 2013	20 Mar 2013
h.	Pengumuman DPT (DPT oleh PPS)	1 Apr 2013	3 Apr 2013
i.	Penetapan Rekapitulasi DPT oleh KPU	7 Apr 2013	8 Apr 2013
III	PENCALONAN		
a.	Pengumuman dan/atau Penyerahan Dokumen Dukungan Calon Perseorangan dalam Pencalonan Pemilukada	21 Jan 2013	25 Jan 2013
b.	Verifikasi Rekapitulasi Dokumen Pasangan Calon Perseorangan	28 Jan 2013	8 Feb 2013

c.	Pengumuman dan Pendaftaran Pasangan Calon yang Diajukan Parpol atau Gabungan Parpol dan Perseorangan	18 Feb 2013	24 Feb 2013
d.	Penelitian dan Pemberitahuan Hasil Verifikasi Pemenuhan Syarat Minimal Dukungan termasuk Penelitian Penambahan Dukungan untuk Calon Perseorangan yang Jumlahnya Menjadi Kurang dari Jumlah Dukungan Paling Rendah Akibat Verifikasi	24 Feb 2013	2 Mar 2013
e.	Melengkapi dan/ atau memperbaiki Surat Pencalonan, Syarat Calon Dan/ atau Mengajukan Calon Baru (Parpol/Gabungan Parpol)	3 Mar 2013	9 Mar 2013
f.	Melengkapi Dan/ atau Memperbaiki Surat Pencalonan Peserta Persyaratan Calon (Perseorangan, yaitu Surat Pencalonan yang Ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan)	3 Mar 2013	16 Mar 2013
g.	Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman Pasangan Calon	1 Apr 2013	8 Apr 2013
IV	KAMPANYE		
a.	Masa Kampanye	5 Mei 2013	19 Mei 2013
V	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
a.	Pembentukan KPPS	16 Apr 2013	1 Mei 2013

b.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	23 Mei 2013	
c.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kelurahan Oleh PPS	24 Mei 2013	25 Mei 2013
d.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Oleh PPK	26 Mei 2013	27 Mei 2013
e.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Oleh KPU Kota Malang	28 Mei 2013	29 Mei 2013
f.	Penetapan Pasangan Calon Terpilih	29 Mei 2013	

Sumber: data tahapan pemilukada kota malang 2013



Lampiran 4

Tabel 6. Data Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara

No	Uraian	Kec. Kedungkandang	Kec. Sukun	Kec. Klojen	Kec. Lowokwaru	Kec. Blimbing	Jml Akhir
1.	Surat suara yang diterima + cadangan	140.441	143.474	83.553	123.668	135.858	626.994
2.	Surat suara yang terpakai	90.281	95.161	51.071	76.514	85.998	399.025
3.	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	648	335	64	68	102	1.217
4.	Surat suara yang tidak terpakai	49.512	47.978	32.418	47.086	49.758	226.752
5.	Prosentase surat suara yang terpakai	64,28%	66,33%	61,12%	61,87%	63,3%	63,64%
6.	Prosentase surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	0,61%	0,32%	0,08%	0,06%	0,08%	0,2%
7.	Prosentase surat suara yang tidak terpakai	35,25%	33,44%	38,80%	38,07%	36,62%	36,16%

Sumber: data rekapitulasi KPU Kota Malang 2013 diolah

Lampiran 5

Tabel 7. Data Klasifikasi Surat Suara Yang Terpakai, Berisi Suara Sah Dan Tidak Sah

No	Uraian	Kec. Kedungkandang	Kec. Sukun	Kec. Klojen	Kec. Lowokwaru	Kec. Blimbing	Jml Akhir
1.	Surat suara sah	85.881	90.559	48.450	73.140	81.618	379.648
2.	Surat suara tidak sah	4.400	4.602	2.621	3.374	4.380	19.377
3.	Total surat suara	90.281	95.161	51.071	76.514	85.998	399.025
4.	Prosentase jumlah surat suara sah	95,13%	95,16%	94,87%	95,6%	94,91%	95,14%
5.	Prosentase jumlah surat suara tidak sah	4,87%	4,84%	5,13%	4,4%	5,09%	4,86%

Sumber: data rekapitulasi KPU Kota Malang 2013 diolah

Lampiran 6



Gambar 3. Logo Kota Malang

Sumber: website resmi Kota Malang 2013 (malang.go.id)



Gambar 4. Logo KPU

Sumber: arsip KPU Kota Malang 2013



Lampiran 7**CURRICULUM VITAE**

1. Nama lengkap : Arya Wira Yudha
2. Jenis kelamin : Laki-Laki
3. Tempat/tgl. Lahir : Malang, 23 Februari 1990
4. Alamat lengkap : JL.PuncakTrihora RII/7 Malang
Telp./ E-mail./: 082231379811/terjang_lawan@yahoo.com
5. Status pendidikan : Semester 10 Program Studi Ilmu Politik
Fak. FISIP
Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya Malang
6. Riwayat pendidikan :
 - a. SD : Madrasah Ibtidaiyah Negeri Malang 1 lulus tahun 2002
 - b. SLTP : SMP Negeri 8 Malang lulus tahun 2005
 - c. SLTA : SMA Negeri 8 Malang lulus tahun 2008
7. Hobi : Membaca buku dan sepak bola
8. Bahasa asing yang dikuasai : B. Inggris (basic)
9. IPK : 3.28

10. Pengalaman Organisasi :

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun	Tingkat
1.	Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Politik (HIMAPOLITIK)	Ketua Divisi Eksternal	2010	Jurusan

11. Pengalaman Mengikuti Kejuaraan / Lomba :

No.	Nama Kejuaraan	Prestasi	Tahun	Tingkat
1.	Lomba Kritik Hari Pendidikan Nasional	Juara I	2010	Fakultas

Model DB1-KWK.KPU



CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT KOTA

NO	URAIAN	KECAMATAN KEDINGKANDANG	KECAMATAN SUKUN	KECAMATAN KLOJEN	KECAMATAN LOWOKWARU	KECAMATAN BLIMBING	JUMLAH AKHIR
DATA PEMILIH							
1	Jumlah Pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (A.2 + A.3)	LK	69,211	39,307	59,229	64,400	300,255
		PR	70,735	42,545	60,860	68,274	312,209
		JML	139,946	81,852	120,089	132,674	612,464
2	Jumlah Pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih	LK	44,023	22,990	35,131	38,720	182,695
		PR	50,612	27,734	41,003	46,788	213,866
		JML	94,635	50,724	76,134	85,508	396,561
3	Jumlah Pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	LK	24,775	16,319	24,098	25,738	117,228
		PR	20,129	14,809	19,857	21,428	98,268
		JML	44,904	31,128	43,955	47,166	215,496
4	Jumlah Pemilih dari TPS lain	LK	262	184	208	278	1,292
		PR	264	163	172	212	1,172
		JML	721	347	380	490	2,464

TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KOTA MALANG



1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

B. DATA PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN SURAT SUARA

1	Surat Suara yang diterima (termasuk cadangan)	140.441	143.474	83.553	123.668	135.858	626.994
2	Surat suara yang terpakai	90.281	95.161	51.071	76.514	85.998	399.025
3	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	648	335	64	68	102	1.217
4	Surat suara yang tidak terpakai	49.512	47.978	32.418	47.086	49.758	226.752

C. KLASIFIKASI SURAT SUARA YANG TERPAKAI, BERISI SUARA SAHDAN TIDAK SAH SERTA JUMLAH TPS/PPS/PPK

1	Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	85,881	90,559	48,450	73,140	81,618	379,548
2	Surat suara tidak sah	4,400	4,602	2,621	3,374	4,380	19,377
3	Jumlah Suara sah dan tidak sah	90,281	95,161	51,071	76,514	85,998	399,025
4	Jumlah TPS	271	266	169	232	264	1.202
5	Jumlah PPS	12	11	11	12	11	57
6	Jumlah PPK	1	1	1	1	1	5

Catatan:

Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang salah dipergeser dan harus diparaf oleh Ketua PPS

KPU KOTA MALANG	
NO	Nama
1	HENDRY, ST.MT
2	RUSMIFAHRIHAL RUSTAM, SH
3	ZAENUDIN, ST
4	ALIM MUSTOFA, S.Sos
5	H. MOCH. FATICH, SH, M.Hum

SAKSI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH			
NO	NAMA	NAMA PASANGAN CALON	TANDA/TANGAN
1	Teguh Ph	H.DWI CAHYONG, SE - MUHAMMAD NUR UDDIN, S.P	1
2		Dra.Hj. SRI RAHAYU - Drs. Ec.RB PRIYATMOKO OETOMO, MM	2
3		Dra.Hj. HERY PUDI UTAMI, M.AP - Ir. SOFYAN EDI JARWOKO	3
4		MUJNIS - YUNAR MULYA	4
5	R.F. Zulum, H.	Drs. AGUS DONO W, M.Hum - IRIE HS, MT	5
6	H. Moch. Anton - SUTIAJ	H. MOCH. ANTON - SUTIAJ	6

